



e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai terestari aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan diperlakukan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap disalinasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasikan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dibentuk dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai cicatanya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan mengamati penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

12. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karena itu diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansial telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat setilai persentase kemasuhan/progress fisik dikalikan nilai kontrakt yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*openname*) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tetapi meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diformulasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi Biaya seminar itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi Biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diberikan tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibayari dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama konstruksi dikapitalisasi dan menimbulkan biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.



lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karena itu diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansial telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat setilai persentase kemasuhan/progress fisik dikalikan nilai kontrakt yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*openname*) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Stutis kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut disela-sela pada titik waktu yang berlalu maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselasaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengakalasannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembayaran. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.



Danadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LSterak pembentukan dana cadangan diskor senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambahan dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan - LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diakui senilai nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

14. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam penilaian dan pelaporan menjadi sangat kritis. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengukuran.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengeloaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada daerah dan penjualan rumah golongan III

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang



dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyewakan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikasih oleh pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya. ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejauh ini dan ATB dalam Pengembangan. Berdasarkan caranya perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukaran, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Arwisan Budaya Sejati (*intangible heritage assets*) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*). ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi hukum pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.



telah melakukan perbuatan melawan hukum baik segera maupun lalu. Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembenaran dari BPK.

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Pernyataan Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah perekayasaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembayaran finansial. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendagungakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyewakan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsepsi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahtakan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,



6) Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempaan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyewaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban mancul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau perintah perundang-perundangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan wuku jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fikih Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya perjanjian kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disajikan.



Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- Dana pinjaman diterima oleh pemerintah;
- Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat semai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan diriyatkan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal merafa. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Afiran ekonomi sebelumnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarantin pada akhir kewajiban, penambahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Untuk Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalain, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan korksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun Pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Jika laporan keuangan belum diterbitkan, maka ditolakkan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau beban.

c. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan



e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atau penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diakui berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dimiliki senilai nilai pari (*original face value*) dengan mempertimbangkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dimiliki senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara

16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam



penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan korksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang terhubung dengan periode yang lalu terhadap posisi kas diliputkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan dilengkapi dalam Catatan.



BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan Pos-pos pada Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan iktisadi sumber alokasi dan pemakaiannya sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasianya dalam satu periode pelaporan. APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 09 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 129 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

I. Pendapatan – LRA

Pendapatan –	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LRA	Rp4.624.897.387.195,26	Rp4.426.473.562.255,23

Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp4.624.897.387.195,26 atau 94,07% dari target senilai Rp4.916.185.685.870,00, mengalami kenaikan senilai Rp198.423.824.940,03 atau 4,48% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.426.473.562.255,23. Rincian pendapatan LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.712.892.170.870,00	1.427.035.167.291,26	83,31
2	Pendapatan Transfer	3.201.541.919.000,00	3.194.676.968.459,00	99,79
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.751.596.000,00	3.185.251.449,00	181,73
Jumlah		4.916.185.685.870,00	4.624.897.387.195,26	94,07

Pendapatan - LRA terdiri dari Pendapatan yang diterima melalui Kas Deraah diangarkan senilai Rp4.255.041.044.960,00 terealisasi senilai

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terrealisasi senilai Rp292.209.982.763,00 atau 90,95% dari target yang ditetapkan senilai Rp31.279.511.132,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi mengurangi nilai Pendapatan PKB senilai Rp9.258.355,00 yang terdiri dari kelebihan penyetoran PAD - PKB yang bukan merupakan objek pajak senilai Rp271.230,00 pada Kab. Alor, Malaka, Sumba Timur dan Kota Kupang dan scharusnya diakui sebagai PAD - Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, serta restitusi PAD - PKB senilai Rp8.987.125,00 yang sebelumnya dicatat sebagai realisasi Belanja Tak Terduga. Rincian lengkap Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hohe Kupang	29.458.929.147,00	102.154.334.878,00	105,00
2	Kabupaten Kupang	20.065.363.526,00	8.180.520.334,00	40,73
3	Rote Ndao	5.419.368.521,00	6.594.464.034,00	121,68
4	TTS	18.384.745.833,00	16.334.769.482,00	91,72
5	TTU	17.421.504.479,00	12.921.445.933,00	86,10
6	Bebu	20.063.612.241,00	18.736.319.994,00	93,65
7	Alor	2.048.972.829,00	4.411.585.271,00	87,46
8	Flores Timur	8.911.644.813,00	7.649.279.709,00	85,74
9	Lembata	5.659.341.997,00	4.419.229.261,00	79,34
10	Sikka	8.623.843.306,00	16.059.317.016,00	86,20
11	Ende	15.507.036.418,00	12.704.420.497,00	79,93
12	Nagekeo	6.099.881.696,00	5.861.187.841,00	95,09
13	Ngade	8.654.250.696,00	8.190.785.307,00	94,84
14	Manggarai Timur	7.730.894.546,00	5.230.896.239,00	67,68
15	Manggarai	19.764.508.426,00	15.232.570.226,00	77,07
16	Manggarai Barat	12.308.540.869,00	10.860.580.088,00	98,24
17	Sumba Timur	14.534.780.026,00	12.434.359.922,00	85,55
18	Sumba Tengah	1.570.379.616,00	7.721.814.544,00	109,66
19	Sumba Barat	6.244.144.160,00	5.858.963.600,00	93,83
20	Sumba Barat Daya	5.970.154.365,00	5.398.680.851,00	90,43
21	Sabu Raijua	1.081.028.652,00	2.909.221.788,00	146,85
22	Malaka	7.513.731.655,00	7.815.095.961,00	102,84
Jumlah		221.279.511.329,00	292.209.982.763,00	90,95

- b) Pajak/Bea Balai Nama Kendaraan Bermotor (BBNK) terrealisasi sembilai Rp196.335.150.885,00 atau 92,84% dari target yang ditetapkan sembilai Rp211.471.928.556,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi kurang BBNKB senilai Rp33.810.000,00 dikarenakan restitusi Pajak Daerah - BBNKB yang sebelumnya dicatat sebagai realisasi Belanja Tak Terduga. Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	62.854.368.482,00	75.860.605.744,00	120,76
2	Kabupaten Kupang	16.942.034.482,00	23.185.000.000,00	0,14
3	Rote Ndao	3.177.567.397,00	4.398.658.000,00	138,46



Rp3.969.852.225.280,97 atau 93,30%, Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang pengelolaan dan penggunaannya secara langsung diangarkan senilai Rp136.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp133.631.334.006,62 atau 98,26% dan Pendapatan dari BLUD SPAM dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.130.451.407,77 atau 56,52% ditambah Pendapatan dari Dana BOS yang ditransfer dan digunakan langsung oleh sekolah senilai Rp520.283.376.499,00 atau 99,45% dari anggaran senilai Rp523.144.640.910,00. Realisasi Pendapatan mencapai 94,07% yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 83,31%. Pendapatan Transfer mencapai 99,79%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 181,73%. Rincian Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pendapatan Asli	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Daerah (PAD)	Rp1.427.035.167.291,26	Rp1.363.737.981.851,23

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 93,31% dari target senilai Rp1.363.737.981.851,23. Pendapatan Asli Daerah diangarkan senilai Rp4.255.041.044.960,00 terealisasi senilai

Rp1.427.035.167.291,26 atau 93,31% dari target senilai Rp1.363.737.981.851,23. Pendapatan Asli Daerah – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.114.609.133.150,00	1.154.622.144.629,04	88,06
2	Retribusi Daerah	85.433.703.905,00	44.202.047.251,00	57,55
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipergunakan	40.645.290.853,00	66.645.894.583,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	275.204.042.992,00	197.365.894.588,22	90,82
Jumlah		1.712.892.170.870,00	1.427.035.167.291,26	93,31

1) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pajak Daerah	Rp1.154.822.144.629,04	Rp1.095.501.455.474,33

Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 88,05% dari target senilai Rp1.114.609.133.150,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp59.320.689.154,71 atau 5,41% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.095.501.455.474,33, dengan rincian sebagai berikut.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terrealisasi sembilai Rp252.370.809.220,00 atau 78,52% dari target yang ditetapkan sembilai Rp214.411.693.606,00. Rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	73.441.603.734,80	50.599.333.947,00	77,07
2	Kabupaten Kupang	15.150.000.928,00	11.410.983.867,00	75,32
3	Rote Ndao	8.400.314.191,00	4.249.049.374,00	76,66
4	TTS	12.469.759.403,00	10.867.092.446,00	87,15
5	TTU	12.077.288.694,00	9.011.900.162,00	74,62
6	Bebu	17.587.902.867,00	13.158.285.155,00	74,70
7	Alor	9.128.574.918,00	7.066.136.046,00	77,43
8	Flores Timur	11.661.039.807,00	9.369.537.370,00	80,25
9	Lembata	5.903.987.427,00	4.924.516.586,00	83,58
10	Sikka	20.861.696.824,00	19.370.825.918,00	73,42
11	Ende	14.851.388.254,00	12.769.168.666,00	85,66
12	Nagekeo	8.223.399.853,00	7.499.937.758,00	81,21
13	Sikka	7.536.697.857,00	5.975.155.962,00	76,26
14	Manggarai	21.249.278.472,00	16.133.831.102,00	75,03
15	Manggarai Timur	7.924.972.389,29	5.298.422.894,00	66,98
16	Manggarai Barat	21.768.706.475,00	17.833.136.523,00	81,96
17	Sumba Timur	16.078.657.213,00	14.462.981.160,00	76,81
18	Sumba Barat	7.510.439.867,00	6.185.300.867,00	82,36
19	Sumba Barat Daya	9.977.074.165,00	6.252.873.951,00	67,04
20	Sumba Tengah	4.833.268.187,00	3.241.111.722,00	67,06
21	Sabu Raijua	2.662.221.284,00	2.587.120.247,00	90,41
22	Malaka	6.361.776.312,00	5.791.203.645,00	91,17
Jumlah		321.411.603.606,00	252.370.809.222,00	78,62



- d) Pajak Air Permukaan (PAP) terrealisasi senilai Rp401.090.755,04 atau 40,11% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi yang mengurangi realisasi Pajak Air Permukaan senilai Rp1.669.432,73 dikarenakan reklasifikasi denda PAP yang sebelumnya diakui sebagai PAD - PAP dan seharusnya diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.570.405,00	1.848.123,00	32,54
2	Kab. Kupang	210.275.820,00	70.291.038,00	33,43
3	Rote Ndao	16.426.170,00	5.039.387,49	31,02
4	TTTS	27.907.614,00	9.477.346,09	33,98
5	TTU	27.318.438,00	3.221.595,00	11,82
6	Batu	20.247.755,00	6.321.813,00	31,22
7	Alor	34.179.046,00	9.913.354,00	29,01
8	Florines Timur	46.349.840,00	32.101.980,00	69,26
9	Lembar	16.958.446,00	11.167.884,56	65,82
10	Sikka	21.411.788,00	4.576.921,00	21,38
11	Ende	62.002.560,00	25.604.819,00	27,90
12	Nagekeo	77.092.950,00	14.954.354,00	19,40
13	Manggarai	29.063.898,00	4.959.094,00	16,54
14	Manggarai Barat	186.729.350,00	68.302.744,00	37,79
15	Manggarai Timur	58.000.000,00	17.716.250,00	30,43
16	Manggarai Selatan	18.350.178,00	5.007.010,00	25,88
17	Sumba Timur	118.654.810,00	110.161.526,00	92,87
18	Sumba Barat	1.000.000,00	0,00	0,00
19	Sumba Barat Daya	1.352.820,00	248.733,00	18,16
20	Sumba Tengah	1.000.000,00	0,00	0,00
21	Sabu Raijua	1.000.000,00	0,00	0,00
22	Malaka	1.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.000.000.000,00	401.090.755,04	40,11

- e) Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2023 secara bruto terrealisasi senilai Rp418.935.379.959,00. Namun, pendapatan yang masuk ke Kas Daerah hanya senilai Rp413.505.111.004,00 atau 90,59% dari target senilai Rp456.446.089.659,00 setelah adanya pemotongan senilai Rp5.430.268.955,00. Pemotongan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi senilai 3,75% dari realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp60.645.290.853,00	Rp37.175.980.457,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA merupakan pendapatan yang bersumber dari penyerahan modal Pemerintah Provinsi NTT pada BUMD. Pada tahun 2023, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi senilai Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp23.469.310.396,00 atau 63,13% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp37.175.980.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT Bank NTT	59.576.253.232,00	53.679.253.232,00	100,00
2	PT Jamirida	6.384.360.405,00	6.384.360.405,00	100,00
3	PT Sengga Asikida	281.877.216,00	281.877.216,00	100,00
Jumlah		60.645.290.853,00	60.645.290.853,00	100,00

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp167.365.684.558,22	Rp169.446.683.892,85

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp167.365.684.558,22 atau 60,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp275.204.042.962,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.080.999.334,63 atau 1,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp169.446.683.892,85. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti



2) Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Retribusi Daerah - LRA	Rp44.202.047.251,00	Rp61.613.862.027,05

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp44.202.047.251,00 atau sebesar 67,55% dari target yang ditetapkan senilai Rp65.433.703.905,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp17.411.814.776,05 atau 28,26% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp61.613.862.027,05. Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.7 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per Jenis

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	30.253.893.252,00	19.086.858.734,00	63,09
2	Retribusi jasa Usaha	34.678.810.653,00	24.724.326.517,00	71,29
3	Retribusi Penitikan	500.000.000,00	351.882.000,00	70,36
Jumlah		65.433.703.905,00	44.202.047.251,00	67,55

Sumber-sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per SKPD

No.	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000,00	634.696.000,00	79,33
2	Dinas Kesehatan	8.000.000.000,00	9.585.414.490,00	119,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000,00	964.001.190,00	37,60
4	Dinas Sosial	165.000.000,00	68.000.000,00	45,30
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.000.000.000,00	1.148.303.000,00	28,71
7	Dinas Pemberdayaan Perdes dan Ketahanan Pangan	75.000.000,00	62.700.000,00	83,60
8	Dinas Perhubungan	2.000.000.000,00	1.160.704.013,00	58,04
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	65.000.000,00	51.000.000,00	85,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	192.850.000,00	55,13
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00	507.058.000,00	84,51
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	44,52
13	Dinas Kehakiman dan Peradilan	10.000.000.000,00	7.611.269.196,00	76,12
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	469.262.880,00	93,85
15	Dinas Pertanian dan Kehutanan	3.100.000.000,00	1.799.423.617,00	56,11
16	Dinas Peternakan	6.500.000.000,00	5.716.821.000,00	87,25

Tabel 5.10 Realisasi Hasil Penjualan BMD

Uraian	Jumlah (Rp)	
Hasil Penjualan (Lejang Ummum) Kendaraan Roda 2 (15 Unit) dan Kendaraan Roda 3 (11 Unit)	36.808.746,00	
Hasil Penjualan (Lejang Ummum) Kendaraan Roda 4 (11 Unit)	449.837.107,00	
Hasil Penjualan (Lejang Ummum) Kendaraan Roda 4 (3 Unit) dan Kendaraan Roda 3 (14 Unit)	71.252.269,00	
Hasil Penjualan (Lejang Ummum) Alat Berat (27 Unit), Kendaraan Roda 6 (2 Unit) dan Roda 2 (12 Unit) dalam bentuk Scrapping/Besi Tua	1.024.985.000,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	5.395.400,00	
Hasil Penjualan (Lejang Ummum) Kendaraan Roda 4 (6 Unit) dan Roda 2 (3 Unit)	155.817.224,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	1.327.000,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	6.435.100,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	6.551.000,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	3.601.500,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	4.307.925,00	
Hasil Penjualan Kendaraan Roda 4	13.977.600,00	
Hasil Penjualan Bongkar Gesung	32.021.116,00	
Hasil Penjualan Inventaris Perlatan	1.981.165,00	
Jumlah		1.814.275.552,00



- d) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp6.019.110.559,00 atau 73,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.219.211.050,00 merupakan Hasil Sewa BMD senilai Rp6.017.229.783,00 dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan MBD senilai Rp1.880.776,00.
- c) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.491.075.076,73 atau 67,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp14.155.733.122,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda BBNKB dengan rincian sebagai berikut.
- (i) Pendapatan Denda PKB terealisasi senilai Rp9.171.526.70,00 atau 78,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.655.733.122,00

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota

No.	Urusan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kota Kupang	2.639.478.646,00	3.172.680.215,00	112,8
2.	Kabupaten Kupang	738.565.010,00	245.665.910,00	33,28
3.	Rote Ndao	164.443.440,00	161.050.901,00	97,94
4.	LTT	667.935.189,00	513.980.391,00	78,91
5.	TTU	500.121.869,00	374.184.117,00	75,02
6.	Batu	737.034.920,00	517.127.383,00	70,16
7.	Alor	311.810.978,00	117.020.476,00	37,51
8.	Flores Timur	310.634.861,00	227.282.385,00	73,17
9.	Lembata	219.062.736,00	164.248.725,00	74,98
10.	Sikka	841.521.820,00	584.961.967,00	69,39
11.	Ende	713.292.847,80	458.986.050,00	64,35
12.	Nagekeo	246.049.823,95	207.689.103,00	84,17
13.	Ngada	255.817.251,42	280.666.652,00	78,66
14.	Manggarai Timur	352.841.452,13	168.575.383,00	47,76
15.	Manggarai	856.567.999,56	478.085.268,00	55,62
16.	Manggarai Barat	495.331.619,07	399.747.612,00	80,5
17.	Sumba Timur	532.652.201,70	493.340.091,00	75,88
18.	Sumba Tengah	57.576.787,64	59.698.467,00	103,68
19.	Sumba Barat	232.653.811,29	139.692.378,00	60,12
20.	Sumba Barat Daya	229.892.838,40	174.812.764,00	76,95
21.	Sabu Raijua	55.031.867,71	83.370.536,00	151,5
22.	Maumere	221.102.760,45	237.348.569,00	107,33
Jumlah		11.656.733.122,02	9.171.787.400,00	78,69

- (2) Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp319.277.676,73 atau 12,77% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000.000,00.



- (3) Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dilingkup Pemerintah Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.509.690.819,57 atau 3,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.883.670.870,00.
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp1.932.463.074,78 atau 5,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp37.891.500.000,00.
- (5) Pendapatan dari Pengembalian antara lain:
- (a) Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000,00.
 - (b) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi senilai Rp769.644.470,31 atau 153,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00.
 - (c) Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biaya terealisasi senilai Rp7.624.398.985,79 atau 127,03% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.000.000.000,00.
 - (d) Kelebihan Pembesaran Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.350.599.967,00.

b. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer – LRA	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.053.836.755.861,00

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.039.880.514.861,00

Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.090,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dari target yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp154.798.453.594,00 atau 5,09% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.039.880.514.861,00. Pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah senilai Rp2.613.326.168.617,10. Sementara selisih senilai Rp581.352.799.837,90 merupakan pendapatan transfer yang tidak



No.	Urusan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kota Kupang	319.134.114,00	77.174.281,00	24,16
2.	Kabupaten Kupang	56.778.060,00	1.848.322,00	3,26
3.	Kabupaten Rote Ndao	30.087.062,00	4.341.859,73	14,45
4.	Kabupaten TTG	88.311.750,00	21.046.690,00	24,39
5.	Kabupaten TTU	62.968.537,00	8.765.091,00	13,93
6.	Kabupaten Belu	124.517.177,00	17.857.160,00	14,34
7.	Kabupaten Alor	383.854.292,00	9.938.300,00	2,48
8.	Kabupaten Flores Timur	245.192.708,00	7.658.608,00	3,12
9.	Kabupaten Lembata	101.657.375,00	16.795.142,00	16,52
10.	Kabupaten Sikka	112.967.196,00	8.941.878,00	7,92
11.	Kabupaten Ende	102.992.568,00	10.794.715,00	10,45
12.	Kabupaten Nagekeo	74.171.302,00	6.589.418,00	8,87
13.	Kabupaten Ngada	33.869.246,00	5.142.320,00	9,27
14.	Kabupaten Manggarai Timur	20.864.346,00	7.317.340,00	35,17
15.	Kabupaten Manggarai	74.453.640,00	12.908.220,00	16,93
16.	Kabupaten Manggarai Barat	73.827.504,00	1.266.523,00	2,03
17.	Kabupaten Sumba Timur	381.847.060,00	57.778.043,00	15,14
18.	Kabupaten Sumba Barat	7.780.420,00	1.086.690,00	13,97
19.	Kabupaten Sumba Barat Daya	23.300.929,00	6.946.000,00	29,81
20.	Kabupaten Sumba	30.988.895,00	3.888.346,00	12,87
21.	Kabupaten Bima	26.865.454,00	3.075.880,00	11,44
22.	Kabupaten Maumere	125.929.757,00	15.761.640,00	12,52
Jumlah		2.500.000.000,00	319.277.676,73	12,77

- f) Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.943.456.850,00.
- g) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebagai BUD terealisasi dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp.068.811.298,93 atau 30,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000.000,00.
- (2) Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp375.358.076,70 atau 37,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00.



- masuk ke Kas Daerah, antara lain: (a) kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp61.069.423.338,00, dan (b) Dana BOS yang ditransfer langsung ke Rekening sekolah senilai Rp520.283.376.499,00. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut.
- a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)
- | Dana Transfer | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Umum – Dana | Rp56.371.680.113,00 | Rp65.358.865.115,00 |
| Bagi Hasil (DBH) | | |
- Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp56.371.681.113,00 atau 104,81% dari target yang ditetapkan senilai Rp55.785.499.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp8.987.184.002,00 atau 13,75% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp65.358.865.115,00. Rincian Dana Bagi Hasil berdasarkan data Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut.
- (1) Berdasarkan data yang tertera pada Simtradu, DBH PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp40.281.255.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan.
 - (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp10.582.978.113,00 atau 32,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.215.041.000,00;
 - (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi senilai Rp2.493.264.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
 - (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.718.093.000,00 atau 26,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.442.849.000,00;
 - (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.139.084.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
 - (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara terealisasi senilai Rp214.006.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan; dan
 - (7) Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 senilai Rp7.310.937.113,00 yang terdiri dari:
 - (a) DBH PPh Pasal 21 senilai Rp5.723.926.621,00;
 - (b) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN senilai Rp251.028.945,00;



- (c) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp751.429.994,00;
- (d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp198.343.170,00;
- (e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara senilai Rp78.510.551,00;
- (f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi senilai Rp133.423.668,00;
- (g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan senilai Rp322.702,00; dan
- (h) Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH senilai Rp173.751.462,00

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Umum - DAU	Rp1.876.608.978.000,00	Rp1.730.933.330.000,00

Dana Alokasi Umum (realisasi senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari target yang ditetapkan semilai Rp1.857.019.095.000,00). Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp145.675.648.000,00 atau 8,42% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.730.933.330.000,00. Total realisasi DAU yang ditransferkan ke Kas daerah hanya senilai Rp218.153.539.554.662,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp1.059.423.338,00 merupakan kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemuliharaan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemuliharaan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Khusus - DAK	Rp1.261.698.310.342,00	Rp1.243.588.319.746,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.109.990.596,00 atau 1,46%



(2) Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Khusus – DAK Non Fisik	Rp801.620.057.996,00	Rp756.060.269.240,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp801.620.057.996,00 atau 98,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp816.088.697.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp45.559.788.756,00 atau 6,03% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp756.060.269.240,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi DAK Non Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik - BOS Rangler	512.480.080.000,00	518.890.314.512,00	100,88
2	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	8.842.580.000,00	3.133.750.000,00	32,50
3	DAK Non Fisik - TPG PN80	245.184.152.000,00	245.184.151.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik - Tamis Gunung PNSD	13.442.250.000,00	5.216.400.000,00	38,81
5	DAK Non Fisik - TKG PN80	8.734.738.000,00	8.734.738.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik - TPA dan Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.928.457.000,00	96,42
7	DAK Non Fisik - TPA dan Taman Budaya Museum	2.000.000.000,00	1.987.499.531,00	99,37
8	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	17.936.156.000,00	14.382.125.850,00	80,07
9	DAK Non Fisik - Fasilitas dan Perbaikan Moshole	668.400.000,00	927.037.200,00	95,73
10	DAK Non Fisik - Dana Pelajaran Pertindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	361.921.779,00	80,51
11	DAK Non Fisik - PKBLMK	3.345.413.000,00	2.973.885.424,00	88,85
Jumlah		816.088.697.000,00	801.620.057.996,00	98,23

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS untuk SMA, SLB Swasta, karena tidak melalui mekanisme Belanja melalui Kas Daerah sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasiannya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).



dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.243.588.319.746,00. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

(1) Dana Transfer Khusus – DAK Fisik

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Khusus – DAK Fisik	Rp460.078.252.346,00	Rp487.528.050.506,00

Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp460.078.252.346,00 atau 96,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp474.648.628.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp27.449.798.160,00 atau 5,63% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp487.528.050.506,00. DAK Fisik merupakan DAK Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Realisasi DAK Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMA	76.332.880.000,00	106.483.833.750,00	139,50
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SLB	11.459.775.000,00	11.127.446.000,00	99,90
3	DAK Fisik-Bidang Perbaikan-Pelugisan-Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik-Casa Pembangunan Persehingan	17.615.773.000,00	15.713.896.504,00	92,35
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Penanganan Penyakit	31.926.486.000,00	30.005.638.050,00	99,98
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.524.248.000,00	11.411.696.705,00	81,60
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penyejaman-Jalan	147.670.491.000,00	148.498.783.315,00	100,56
7	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur-Penugasan	4.784.830.000,00	4.491.068.350,00	93,88
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Perbaikan-Pelugisan-Kehutanan	17.708.286.000,00	16.421.497.705,00	92,73
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	121.920.575.000,00	90.282.458.288,00	74,05
10	DAK Fisik-Bidang Kesejahteraan dan KB-Penerapan Sistem Kesehatan	22.289.568.000,00	21.150.000.000,00	94,89
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Peneruran-Penugasan	5.337.006.000,00	4.491.932.688,00	84,17
Jumlah		474.648.628.000,00	460.078.252.346,00	96,93



2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA pada Pemerintah Provinsi NTT merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif	31 Desember 2023	31 Desember 2022
DID	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memperoleh DID dan tahun 2022 merealisasikan senilai Rp13.956.241.000,00 sehingga DID mengalami penurunan senilai Rp13.956.241.000,00 dari tahun 2022.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	Rp3.183.251.449,00	Rp8.898.824.543,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.751.596.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp8.898.824.543,00 dengan rincian:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp788.174.449,00;
- 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri merupakan Hibah dari Dealer terhadap penjualan kendaraan yang terjual di Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.595.877.000,00; dan
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri merupakan Hibah dari PT Jasa Raharja terealisasi senilai Rp799.200.000,00.

2. Belanja dan Transfer Daerah

Belanja dan Transfer Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer Daerah	Rp4.460.910.047.257,77	Rp4.816.652.654.356,79

Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.816.652.654.356,79. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah terdiri dari:



Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	4.245.547.872.471,00	3.807.392.689.188,77	89,68
Transfer Daerah	650.237.594.356,00	663.517.368.069,00	100,60
Jumlah	4.895.785.466.827,00	4.460.910.047.257,77	91,12

Belanja dan Transfer Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Belanja Daerah

Belanja Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.807.392.689.188,77	Rp4.275.881.784.555,79

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	3.564.429.411.635,00	3.186.343.321.625,27	88,47
Belanja Modal	638.024.521.109,00	621.342.023.889,50	97,38
Belanja Tdk Terlaksana	11.565.930.527,00	707.344.000,00	6,40
Jumlah	4.245.547.872.471,00	3.807.392.689.188,77	89,68

Belanja Daerah tersebut di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Operasi	Rp1.185.343.321.503,27	Rp3.051.851.164.202,45

Belanja Operasi Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp3.185.343.321.503,27 atau 88,57% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp3.564.429.411.635,00, mengalami peningkatan senilai Rp133.492.157.300,82 atau 4,37% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.051.851.164.202,45. Rincian belanja operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pegawai	Rp1.511.605.996.659,00	Rp1.421.874.102.462,37

Belanja Pegawai terrealisasi senilai Rp1.511.605.996.659,00 atau 91,54% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.651.390.116.506,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp89.731.894.196,63 atau 6,31% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.421.874.102.462,37. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Belanja Pegawai

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.037.902.562.105,00	939.155.850.320,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.379.169.964,00	143.643.134.592,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan	282.340.894.399,00	266.947.895.478,00



No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	45.634.365.936,00	40.546.566.319,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WNDH	189.410.354,00	239.872.346,00
8	Belanja Penerimaan Lainnya dan Pengeluaran DPRD serta KDH/WNDH	2.314.150.000,00	3.228.000.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	2.465.522.000,00
6	Belanja Pegawai BLUD	4.945.393.881,00	5.648.561.407,01
	Jumlah	1.511.605.996.659,00	1.421.874.102.462,37

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.056.436.180.510,00	972.464.185.678,00	92,14
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	99.455.796.000,00	92.034.269.860,00	92,54
3	Dinas Kesehatan	22.029.128.000,00	20.176.037.053,00	91,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	26.598.021.036,00	22.196.432.475,00	81,31
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.195.551.000,00	9.184.369.270,00	90,04
6	Badan Penganggaran Bencana Daerah	4.831.411.000,00	4.293.468.349,00	88,87
7	Dinas Sosial	16.743.920.000,00	15.034.770.588,00	89,79
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.838.298.999,00	4.096.445.546,00	84,67
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69.888.381.000,00	64.460.667.517,00	92,50
10	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa	5.477.863.000,00	4.868.022.947,00	88,87
11	Dinas Perhubungan	11.590.960.200,00	10.406.472.881,00	89,96
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.098.418.000,00	5.483.028.114,00	80,02
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.946.809.000,00	14.568.600.678,00	91,36
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.740.562.000,00	5.170.859.672,00	90,07
15	Dinas Kepuiman dan Olahraga	8.574.276.000,00	7.686.515.384,00	89,65
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.361.000.000,00	8.931.117.393,00	81,01

Tabel 5.19 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	247.976.027.515,37	203.742.491.297,42
2	Belanja Jasa	426.589.978.165,00	466.143.365.864,00
3	Belanja Pemeliharaan	9.116.763.815,00	15.706.145.113,00
4	Belanja Pengelolaan Dinas	100.970.954.095,00	113.912.468.624,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Luar/Masyarakat	22.768.414.353,00	11.654.427.741,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	284.688.167.056,90	274.806.667.587,10
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.732.229.026,00	122.338.500.869,32
	Jumlah	1.207.862.533.807,27	1.208.109.064.995,84

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	630.634.034.587,00	424.811.164.278,60	67,38
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	150.420.109.169,00	100.594.086.530,37	52,19
3	Dinas Kesehatan	16.334.466.275,60	15.034.262.161,00	99,25
4	Dinas Perkembangan Urum dan Perumahan Rakyat	30.269.218.635,00	24.700.820.153,00	81,52
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.509.141.700,00	2.168.265.724,00	61,79
6	Badan Penganggaran Bencana Daerah	5.420.719.400,00	2.808.764.027,00	51,82
7	Dinas Sosial	21.176.284.952,00	17.524.191.136,00	82,8
8	Dinas Perekonomian dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.988.014.356,00	1.469.240.600,00	75,41
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.600.631.382,00	23.155.071.129,00	87,22
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.573.728.760,00	2.533.442.410,00	70,89
11	Dinas Perhubungan	4.829.709.000,00	4.732.719.950,00	99,07
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.306.955.760,00	6.145.857.935,00	97,45
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.205.223.876,00	6.588.508.032,00	71,57
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.221.236.448,00	1.915.149.373,00	86,22
15	Dinas Kependidikan dan Olahraga	10.224.480.014,00	8.798.351.260,00	86,95



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Dinas Kepariwisataan dan Perkotaan	3.112.839.558,00	2.761.688.991,00	88,72
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.438.759.847,00	7.622.644.379,00	80,76
18	Dinas Panenita dan Ekonomi Kreatif	3.708.834.780,00	2.006.453.427,00	54,1
19	Dinas Pertanian dan Kelahanan Pangan	26.387.989.982,00	21.922.401.543,00	83,08
20	Dinas Pendidikan	13.534.849.010,00	11.076.336.373,00	81,79
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	93.641.188.444,00	69.708.801.737,00	95,8
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.666.271.848,00	2.635.504.702,00	62,91
23	Jaksaan Agung Dinas	92.220.827.19,00	24.445.824.518,00	99,19
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90.292.458.040,00	78.360.815.054,00	87,89
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.266.098.290,00	5.291.754.567,00	57,1
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	30.421.405.612,00	24.713.068.837,00	88,03
27	Badan Keuangan Daerah	29.813.464.895,00	24.124.528.863,00	81,47
28	Badan Pengembangan Daerah	4.208.138.880,00	3.710.584.795,00	88,16
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.470.445.323,00	13.374.269.773,00	80,23
30	Badan Pengembangan Perbatasan Daerah	1.671.115.120,00	1.377.314.015,00	82,42
31	Badan Pengitungan Provinsi NTT di Jakarta	4.878.662.550,00	4.814.145.177,00	94,58
32	Inspektorat Daerah	9.297.028.580,00	5.574.618.282,00	60,03
33	Badan Keuaran Bangsa dan Politik	8.040.985.460,00	5.920.424.860,00	83,11
Jumlah		1.564.082.592.106,00	1.207.862.533.807,27	77,22

Realisasi Belanja Barang dan Jasa jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 77,22%, perbedaan signifikan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember. Realisasi yang lebih kecil pada Belanja Barang dan Jasa menyebabkan kelebihan realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap dan Lainnya.



No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
6	Juni	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
7	Juli	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00
8	Agustus	980.877.323.256,00	1.814.623.048,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
9	September	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
10	Oktober	980.877.323.256,00	0,00	5.069.692.100,00	5.069.692.100,00
11	November	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
12	Desember	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00
Total Kewajiban Tahun 2023		1.814.623.048,00	61.069.423.338,00	62.884.046.386,00	

d) Belanja Hibah

Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Hibah	Rp379.445.844.651,00	Rp335.277.916.325,00

Belanja Hibah Tahun 2023 terrealisasi sebesar Rp379.445.844.651,00 atau 141,04% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp335.277.916.325,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.167.928.326,00 atau 13,17% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp335.277.916.325,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi/kurang belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atau pengembalian sisa kas senilai Rp7.132.010,00 yang sebenarnya salah dikeluarkan sebagai Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan atas Pengembalian Perjalanan Dinas, Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Hibah Untuk kepada Pemerintah Pusat terrealisasi senilai Rp31.458.800.000,00 atau 79,77% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp31.458.800.000,00 atau 141,04% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp335.277.916.325,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi/kurang belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atau pengembalian sisa kas senilai Rp7.132.010,00 yang sebenarnya salah dikeluarkan sebagai Lain-lain PAD yang Sah.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:

- (a) Belanja Hibah Untuk kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terrealisasi senilai Rp64.157.892.945,00 atau 98,17% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp65.351.465.500,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari;
- (b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terrealisasi senilai Rp7.704.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.



Atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa – Perjalanan Dinas pada Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 tidak mencerminkan nilai belanja yang sebenarnya karena terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp15.017.950,00.

Pada Dinas Sosial terdapat Belanja Bahan-Bahan Baku untuk Kegiatan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan Belanja Bantuan Sosial langsung non tunai (beras) bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem Provinsi NTT TA 2023 senilai Rp2.000.000.000,00. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui penurunan besarnya pengeluaran.

e) Belanja Bunga

Belanja Bunga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp62.884.046.386,00	Rp54.539.281.319,24

Belanja Bunga Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp62.884.046.386,00 atau 99,23% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp54.374.211.388,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.745.066,76 atau 15,30% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.539.281.319,24. Belanja Bunga Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 merupakan pembayaran kewajiban Bunga kepada PT SMI-PEN senilai Rp1.069.423.338,00 melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.814.623.048,00 yang dibayarkan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Pembayaran kewajiban bunga pada PT SMI-PEN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemuliharaan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemuliharaan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN Tahun 2023

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
1	Januari	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
2	Februari	980.877.323.256,00	0,00	4.739.183.597,00	4.739.183.597,00
3	Maret	980.877.323.256,00	0,00	4.762.379.379,00	4.762.379.379,00
4	April	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
5	Mei	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00



Rp54.262.892.945,00 atau 98,95% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp54.841.465.500,00 dengan rincian Belanja Bunga Uang dan senilai Rp2.136.970.900,00 dan Belanja Hibah barang senilai Rp52.125.921.955,00.

(c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terrealisasi senilai Rp64.157.892.945,00 atau 98,17% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp65.351.465.500,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari;

- (a) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Swasta terrealisasi senilai Rp176.122.330.906,00 atau 589,19% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp29.892.191.735,00, yaitu, untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMAS/SMKS/SLSB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Swasta senilai Rp12.857.530.906,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandiksen Swasta senilai Rp2.264.800.000,00.
- (b) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terrealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari;

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perbaikan Kebangkitan Bangsa	265.742.800,00	265.742.800,00	100,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	187.510.800,00	187.510.800,00	100,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	424.128.000,00	424.128.000,00	100,00
4	Partai Golongan Rakyat	419.671.200,00	419.671.200,00	100,00
5	Partai Nasional Demokrat	370.584.000,00	370.584.000,00	100,00
6	Partai Permatuan Indonesia	179.648.400,00	179.648.400,00	100,00
7	Partai Permatuan Pembangunan	65.728.800,00	65.728.800,00	100,00
8	Partai Solidaritas Indonesia	121.965.600,00	121.965.600,00	100,00
9	Partai Amanat Nasional	246.236.400,00	246.236.400,00	100,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	201.205.200,00	201.205.200,00	100,00
11	Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	100,00



No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah		2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	100,00

Terdapat 11 partai politik yang menerima Belanja Hibah dengan realisasi masing-masing partai politik sebesar 100% dari anggaran. Daftar partai politik penerima bantuan hibah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 60/KEP/HK/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Partai Politik Tingkat Provinsi Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Penerima Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Hibah per Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.349.599.735,00	227.140.252.861,00	279,22
2	Dinas Peternakan dan Pellohman Rakyat	11.239.654.500,00	1.100.000.000,00	88,71
4	Dinas Geos	358.000.000,00	350.000.000,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.092.000.000,00	999.864.200,00	99,99
7	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00
8	Dinas Kependidikan dan Olahraga	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	100,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000,00	835.000.000,00	83,50
10	Sekretariat Daerah	3.000.000.000,00	2.993.000.795,00	98,77
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173.984.734.400,00	139.415.620.800,00	80,13
Jumlah		269.028.391.535,00	379.446.844.651,00	141,04

Realisasi Belanja Hibah melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp379.446.844.651,00 atau 141,04%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan Belanja Hibah atas BOS Swasta yang dianggarkan dalam APBD-P belum mengacu pada alokasi BOS untuk sekolah swasta.

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp23.544.900.000,00 atau 48,49% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp48.552.100.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami



No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
Jumlah		638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38

Realisasi Belanja Modal Hasil Pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 621.342.023.685,50 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Tanah Rp0,00 Rp1.050.294.656,00

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah. Nilai tersebut mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.050.294.656,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Peralatan dan Mesin Rp193.621.780.165,50 Rp144.284.448.880,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp193.621.780.165,50 atau 113,43% dari yang direncanakan senilai Rp170.694.164.778,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp49.337.331.285,50 atau 34,19% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp144.284.448.880,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.893.117.039,00	126.855.040.730,00	126,79
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	50.549.847.300,00	64.055.633.805,00	106,84
3	Dinas Kesehatan	2.748.235.399,00	1.583.956.379,00	57,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perbaikan Rakyat	2.794.743.900,00	288.288.564,00	10,32
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.521.800,00	37.296.000,00	32,01
6	Dinas Sosial	807.464.300,00	281.745.355,00	34,89
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.118.900,00	31.822.000,00	47,83
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	689.028.400,00	14.171.000,00	2,05
9	Dinas Perhubungan	33.769.853,00	32.408.160,00	95,97
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.112.850,00	32.523.000,00	21,81



penurunan senilai Rp8.505.900.000,00 atau 26,54% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp32.050.800.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 terdiri dari:

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu terrealisasi senilai Rp302.400.000,00 atau 34,77% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp869.600.000,00;
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terrealisasi senilai Rp20.432.500.000,00 atau 49,28% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp41.462.500.000,00; dan
- (3) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Kragamaan dan Bidang lainnya) terrealisasi senilai Rp2.810.000.000,00 atau 45,18% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp6.220.000.000,00.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Sosial	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	51,76
2	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.212.500.000,00	3.152.500.000,00	50,74
3	Dinas Kependidikan dan Olahraga	1.400.000.000,00	620.000.000,00	54,39
4	Sekretariat Daerah	9.299.800.000,00	3.262.400.000,00	35,08
Jumlah		48.552.100.000,00	23.544.900.000,00	48,49

2) Belanja Modal

Belanja **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Modal Rp621.342.023.685,50 Rp1.216.802.446.597,34

Belanja Modal Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp621.342.023.685,50 atau 97,38% dari yang direncanakan senilai Rp638.064.521.309,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp595.460.422.911,84 atau 48,94% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.216.802.446.597,34. Rincian Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.223.000,00	0,00	-
12	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan	127.372.290,00	121.904.000,00	95,71
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.057.487.400,00	3.756.139.160,00	92,65
14	Dinas Pertanian dan Kelahanan Pantai	5.991.686.500,00	4.933.255.744,00	82,33
15	Dinas Peternakan	43.294.000,00	15.705.000,00	36,28
16	Dinas Energi Sumber Daya dan Persekitaran	132.073.000,00	0,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	106.849.000,00	0,00	-
18	Sekretariat Daerah	668.843.167,20	434.784.506,50	65,01
19	Perwakilan Bapak Daerah	60.195.000,00	32.623.750,00	59,60
20	Badan Pendidikan dan Aset Daerah	1.194.639.080,00	1.032.277.000,00	86,41
21	Badan Keuangan Daerah	115.368.000,00	115.361.190,00	99,99
22	Badan Kepajuan Daerah	96.791.800,00	95.974.020,00	99,16
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	104.625.000,00	0,00	-
24	Badan Pengelola Perbaikan Daerah	26.032.000,00	25.974.000,00	99,78
25	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	18.390.000,00	15.300.000,00	89,42
26	Inspektorat Daerah	54.739.000,00	15.297.000,00	27,95
27	Badan Kesiuan Bangsa dan Politik	15.698.000,00	0,00	-
Jumlah		170.594.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp193.621.780.165,50 atau sebesar 113,43%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perbaikan atas RKAS setelah APBD-P dibatalkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Gedung dan Bangunan Rp248.250.770.111,00 Rp141.655.437.253,34

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp248.250.770.111,00 atau 86,96% dari yang direncanakan senilai Rp285.490.047.285,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan



se nilai Rp106.595.332.857,66 atau 75,25% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp141.655.437.253,34. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	221.220.119.350,00	210.406.100.050,00	95,11
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	25.261.042.283,00	1.577.681.823,00	6,25
3	Dinas Kesehatan	1.133.029.200,09	1.129.033.670,00	99,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39.556.000,00	39.556.000,00	100,00
5	Dinas Sosial	706.038.320,00	403.997.637,00	56,93
6	Dinas Pertambangan	5.487.498.643,00	4.728.757.339,00	84,63
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.709.305,00	0,00	-
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.450.000.000,00	19.957.050.000,00	97,81
9	Dinas Perikanan dan Kehutanan Pengembangan	10.518.899.850,00	9.424.183.000,00	89,59
10	Dinas Pelemanan	342.769.334,00	332.766.334,00	100,00
11	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	56.032.000,00	56.032.293,00	100,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	198.360.000,00	196.609.000,00	99,12
Jumlah		285.490.047.285,00	248.250.770.111,09	86,96

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Modal Jalan,	Rp155.271.232.138,00	Rp909.704.835.562,00
Irigasi dan		
Jaringan		

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp155.271.232.138,00 atau 86,84% dari yang direncanakan senilai Rp178.807.578.196,00, mengalami penurunan senilai Rp754.433.603.424,00 atau 82,93% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp909.704.835.562,00, dengan rincian sebagai berikut.

disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp7.344.000,00	Rp7.228.173.756,00

Belanja Tak Terduga Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp7.344.000,00 atau 6,40% dari yang direncanakan senilai Rp11.055.939.527,00. Belanja tak terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk keperluan darurat mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga mengalami penurunan senilai Rp6.520.829.756,00 atau 90,21% dari realisasi tahun 2022. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk:

- i) Penanganan Darurat Bencana senilai Rp677.344.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari:
 - a) Penanganan Jembatan Darurat di Kabupaten Kupang senilai Rp367.274.000,00
 - b) Penanganan Jalan Alternatif Niki-niki – Oenlasi Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp270.000.000,00.
 - c) Penanganan Jalan dan Jembatan Alternatif Termanu di Kabupaten Kupang senilai Rp40.070.000.
- b) Penanganan Keperluan Mendesak pada Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp30.000.000,00 untuk kegiatan Penanganan Inflasi terhadap 200 Kepala Keluarga di Kota Kupang.

b. Transfer Daerah

Transfer Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp653.517.358.069,00	Rp540.770.869.801,00

Transfer Daerah Tahun 2023 terrealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang direncanakan senilai Rp650.237.594.350,00, mengalami kenaikan senilai Rp112.746.488.268,00 atau 20,85% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp540.770.869.801,00. Transfer Daerah terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

Urutan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61
Transfer Bantuan Keuangan	700.000.000,00	-	-
Jumlah	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50



Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	74.899.700,00	100,00
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	643.000.000,00	0,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	172.944.478.196,00	150.526.232.438,00	87,04
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.145.100.000,00	4.670.000.000,00	90,77
Jumlah		178.807.578.196,00	159.271.232.138,00	86,84

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Modal Aset	Rp24.198.241.271,00	Rp20.107.430.246,00
Tetap		
Lainnya		

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terealisasi senilai Rp24.198.241.271,00 atau 787,52% dari yang direncanakan senilai Rp4.090.811.025,00 atau 20,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp20.107.430.246,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.730.504.550,00	22.654.541.732,00	1.326,16
2	Dinas Kesehatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	753.672.600,00	718.087.038,00	95,28
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	918.000,00	0,00	-
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.494.500,00	0,00	-
6	Dinas Peranaman Moda dan Pemakaian Terpadu Sama Pertiwi	3.232.000,00	2.911.711,00	90,09
7	Dinas Kearsipan dan Pengembalian	593.500.000,00	515.200.790,00	87,43
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.510.000,00	0,00	-
Jumlah		3.072.731.050,00	24.198.241.271	787,62

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp24.198.241.271,00 atau 787,52%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P

1) Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp653.517.358.069,00	Rp527.502.869.801,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp49.537.594.350,00 dan terealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,61%. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp12.014.488.268,00 atau 23,89% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp527.502.869.801,00. Rincian Transfer Bagi Hasil terdiri dari:

- a) Bagi Hasil Pagak Kendaraan Bermotor terrealisasi senilai Rp80.362.783.857,00 atau 100,00% dari anggaran. Dari total realisasi senilai Rp80.362.783.857,00 terdiri dari bagi hasil tahun 2023 senilai Rp29.671.163.606,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp50.691.620.251,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.31 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.403.688.950,00	15.903.688.950,00	100,00
2	Kab. Alor	2.401.816.507,00	2.401.816.507,00	100,00
3	Kab. Bebe	4.294.282.164,00	4.294.282.164,00	100,00
4	Kab. Ende	3.464.166.251,00	3.464.166.251,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	2.844.889.901,00	2.844.889.901,00	100,00
6	Kab. Kupang	4.310.559.015,00	4.310.559.015,00	100,00
7	Kab. Lembata	2.392.406.744,00	2.392.406.744,00	100,00
8	Kab. Malaka	2.774.370.377,00	2.774.370.377,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	4.202.579.758,00	4.202.579.758,00	100,00
10	Kab. Manggarai	3.929.193.338,00	3.929.193.338,00	100,00
11	Kab. Taliabu	2.802.345.239,00	2.802.345.239,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	2.515.954.479,00	2.515.954.479,00	100,00
13	Kab. Ngada	2.894.559.444,00	2.894.559.444,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	2.611.321.658,00	2.611.321.658,00	100,00
15	Kab. Sape Rajua	2.129.224.481,00	2.129.224.481,00	100,00
16	Kab. Sikka	3.793.682.158,00	3.793.682.158,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat Daya	2.645.555.481,00	2.645.555.481,00	100,00
18	Kab. Sumba Barat	2.512.427.591,00	2.512.427.591,00	100,00
19	Kab. Sumba Tengah	2.054.313.552,00	2.054.313.552,00	100,00
20	Kab. Sumba Timur	3.545.518.380,00	3.545.518.380,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	3.982.933.081,00	3.982.933.081,00	100,00
22	Kab. Timor Tengah Utara	3.562.812.388,00	3.562.812.388,00	100,00
Jumlah		80.362.783.857,00	80.362.783.857,00	100,00

- b) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp7.840.555.812,00 atau 78,19% yang dianggarkan senilai Rp100.274.234.521,00. Realisasi Bagi Hasil Bea Balik Nama



Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2023 senilai Rp32.115.832.583,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp46.287.223.429,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.32 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	33.237.172.454,00	11.365.993.745,00	34,20
2	Kab. Alor	2.507.273.444,00	2.507.273.444,00	100,00
3	Kab. Belu	4.038.227.969,00	4.038.227.969,00	100,00
4	Kab. Ende	3.442.536.742,00	3.442.536.742,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	2.969.726.804,00	2.969.726.804,00	100,00
6	Kab. Kupang	5.583.288.696,00	5.383.289.696,00	100,00
7	Kab. Lembaria	2.450.171.294,00	2.450.171.294,00	100,00
8	Kab. Malaka	3.384.475.849,00	3.384.475.849,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	3.741.297.170,00	3.741.297.170,00	100,00
10	Kab. Manggarai	3.555.679.576,00	3.555.679.576,00	100,00
11	Kab. Timor	2.782.354.141,00	2.702.354.141,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	2.617.669.910,00	2.607.869.910,00	100,00
13	Kab. Ngada	2.534.024.416,00	2.534.024.416,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	8.511.338.893,00	8.511.338.893,00	100,00
15	Kab. Sabu Raijua	2.294.135.497,00	2.294.135.497,00	100,00
16	Kab. Sikka	4.419.357.487,00	4.419.357.487,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat Daya	2.213.652.856,00	2.213.689.856,00	100,00
18	Kab. Sumba Tengah	2.450.376.865,00	2.450.376.865,00	100,00
19	Kab. Sumba Utara	3.459.731.862,00	3.459.731.862,00	100,00
20	Kab. Sumbawa	4.473.812.892,00	4.473.812.892,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	3.761.853.886,00	3.761.853.886,00	100,00
22	Jumlah	100.274.234.521,00	78.403.055.812,00	78,19

- c) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp206.647.061.546,00 atau 138,59% dari yang dianggarkan senilai Rp149.108.352.174,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2023 senilai Rp103.569.674.709,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp103.077.385.637,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.33 Realisasi Bagi Hasil PBRKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	13.983.559.354,00	21.824.457.537,00	156,07
2	Kab. Alor	9.748.841.756,00	7.978.107.984,00	137,04
3	Kab. Belu	7.932.101.034,00	10.721.102.636,00	135,58
4	Kab. Ende	7.135.066.121,00	9.795.703.271,00	137,30
5	Kab. Flores Timur	8.398.046.556,00	8.644.198.723,00	137,08



20	Kab. Sumba Timur	14.535.907.281,00	13.349.183.074,00	91,84
21	Kab. Timor Tengah Selatan	23.161.984.624,00	21.282.925.788,00	91,89
22	Kab. Timor Tengah Utara	15.252.833.046,00	13.680.967.881,00	85,56
Jumlah		319.812.262.762,00	287.824.497.018,00	90,00

- e) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp239.961.036,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terdiri dari realisasi tahun 2023 senilai Rp92.865.302,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp187.095.734,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	2.282.098,00	2.282.098,00	100,00
2	Kab. Alor	5.281.739,00	5.281.739,00	100,00
3	Kab. Belu	7.289.163,00	7.289.163,00	100,00
4	Kab. Ende	13.128.856,00	13.128.856,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	8.265.490,00	8.265.490,00	100,00
6	Kab. Kupang	8.573.770,00	8.573.770,00	100,00
7	Kab. Lembaria	8.439.626,00	8.439.626,00	100,00
8	Kab. Malaka	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	8.568.857,00	8.568.857,00	100,00
10	Kab. Manggarai	44.801.082,00	44.801.082,00	100,00
11	Kab. Timor	12.900.856,00	12.900.856,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	8.001.997,00	8.001.997,00	100,00
13	Kab. Ngada	18.002.908,00	18.002.908,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	4.256.213,00	4.256.213,00	100,00
15	Kab. Sabu Raijua	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
16	Kab. Sikka	8.705.071,00	8.705.071,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.045.177,00	3.045.177,00	100,00
19	Kab. Sumba Tengah	2.837.495,00	2.837.495,00	100,00
20	Kab. Sumba Timur	57.320.340,00	57.320.340,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	8.260.537,00	8.260.537,00	100,00
22	Kab. Timor Tengah Utara	8.161.386,00	8.161.386,00	100,00
Jumlah		279.961.036,00	279.961.036,00	100,00



Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi senilai Rp287.824.497.018,00 atau 90,08% dari yang dianggarkan senilai Rp19.512.262.762,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Kab. Kupang	7.481.082.022,00	10.168.358.167,00	135,92
7	Kab. Lembaria	6.022.887.983,00	6.004.055.601,00	97,25
8	Kab. Malaka	5.102.287.260,00	5.056.198.904,00	106,34
9	Kab. Manggarai Barat	8.021.340.021,00	12.224.416.467,00	135,51
10	Kab. Manggarai	8.732.089.035,00	11.921.598.755,00	136,53
11	Kab. Manggarai Timur	5.157.123.633,00	7.114.242.712,00	137,96
12	Kab. Nagekeo	5.314.456.209,00	7.397.180.014,00	137,67
13	Kab. Ngada	5.824.172.982,00	7.906.281.436,00	137,29
14	Kab. Rote Ndao	4.848.598.915,00	6.819.748.961,00	136,53
15	Kab. Sikka	10.184.765.581,00	13.899.832.713,00	135,94
16	Kab. Sumba	4.247.467.293,00	5.774.124.896,00	135,94
17	Kab. Sumba Barat	3.258.510.299,00	7.204.049.594,00	138,72
18	Kab. Sumba Barat Daya	6.035.680.700,00	8.215.505.897,00	138,14
19	Kab. Sumba Tengah	4.770.963.945,00	5.517.901.172,00	136,62
20	Kab. Sumba Timur	8.211.802.286,00	11.245.572.867,00	136,94
21	Kab. Timor Tengah Selatan	6.862.017.223,00	8.742.147.789,00	137,41
22	Kab. Timor Tengah Utara	6.457.221.986,00	8.830.147.388,00	136,75
Jumlah		149.108.352.174,00	208.647.050.346,00	138,59

- d) Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi senilai Rp287.824.497.018,00 atau 90,08% dari yang dianggarkan senilai Rp19.512.262.762,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.14 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	23.409.994.590,00	17.771.017.737,00	75,92
2	Kab. Alor	13.220.580.215,00	12.138.756.598,00	91,80
3	Kab. Belu	13.934.892.441,00	12.420.648.725,00	91,77
4	Kab. Ende	15.549.683.295,00	14.385.393.690,00	91,63
5	Kab. Flores Timur	16.070.012.224,00	14.742.988.961,00	91,74
6	Kab. Kupang	19.883.130.087,00	18.238.578.326,00	91,73
7	Kab. Lembaria	10.076.572.033,00	7.866.614.137,00	78,07
8	Kab. Malaka	12.057.010.980,00	11.067.948.237,00	91,60
9	Kab. Manggarai Barat	16.146.005.920,00	13.889.472.003,00	91,77
10	Kab. Manggarai	17.353.793.023,00	15.938.496.261,00	91,84
11	Kab. Mamberae	18.643.418.318,00	14.517.607.424,00	91,03
12	Kab. Nagekeo	11.149.125.264,00	10.226.510.269,00	91,72
13	Kab. Ngada	11.317.412.823,00	10.385.830.069,00	91,77
14	Kab. Rote Ndao	10.445.738.098,00	9.983.432.721,00	91,74
15	Kab. Sabu Raijua	8.153.664.008,00	7.486.156.298,00	91,74
16	Kab. Sikka	17.736.460.488,00	16.286.692.446,00	91,84
17	Kab. Sumba Barat	10.592.872.078,00	9.711.462.539,00	91,68
18	Kab. Sumba Barat Daya	16.963.454.269,00	15.986.517.123,00	91,85
19	Kab. Sumba Tengah	8.059.148.021,00	7.388.284.947,00	91,68

2) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan 31 Desember 2023 31 Desember 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Keuangan	Rp0,00	Rp13.268.000.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 terealisasi senilai Rp700.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan dari Rp1.000.000.000,00 pada 2022. Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 terealisasi senilai Rp163.987.339.937,49 atau 803,85% dari yang direncanakan senilai Rp20.400.210.049,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan dari Rp554.166.432.039,05 dari Surplus/Defisit Tahun 2022 senilai Rp190.179.092.101,56.

4. Pembayaran Daerah

Pembayaran Daerah 31 Desember 2023 31 Desember 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembayaran Daerah	Rp42.776.281.730,55	Rp47.321.231.790,906,71

Pembayaran Daerah terdiri dari penetapan pembayaran dan pengeluaran pembayaran. Penetapan pembayaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00 dengan pengeluaran pembayaran senilai Rp278.402.656.453,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi penetapan pemb



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pjungan Daerah:	4.159.731.998,00	2.318.322.197,30	55,73	3.523.465.914,00
	Total	288.092.344.404,00	222.002.984.475,45	86,05	798.167.336.796,61

b. Pengeluaran Pembialyan

Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembialyan	Rp264.779.266.206,00	Rp322.953.545.889,90

Pengeluaran Pembialyan tahun 2023 diangarkan senilai Rp278.402.563.453,00 terrealisasi senilai Rp264.779.266.206 atau 95,11% dan realisasi tahun 2022 senilai Rp322.953.545.889,90, yang terdiri dari:

Tabel 5.37 Realisasi Pengeluaran Pembialyan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Pemberituan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	240.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
2	Perekayasa Modal Dalam	-	-	-	14.000.000.000,00
3	Giro Pokok Utang yang Jatuh Tempo (PT SMI PEN)	38.402.563.453,00	24.779.266.206,00	64,53	208.953.545.889,90
	Total	278.402.563.453,00	264.779.266.206,00	95,11	322.953.545.889,90

c. Pembialyan Neto

Pembialyan Neto	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp42.776.281.730,55)	Rp473.213.790.906,71

Pembialyan Neto tahun 2023 terrealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% dari rencana yang ditetapkan senilai (Rp20.400.210.040,00), dan tahun 2022 terrealisasi senilai Rp473.213.790.906,71. Pembialyan Neto senilai (Rp42.776.281.730,55) diperoleh dari selisih antara penerimaan pembialyan senilai Rp222.002.984.475,45 dan Pengeluaran Pembialyan senilai Rp264.779.266.206,00.

d. SILPA

SILPA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp121.211.058.206,94	Rp83.034.698.805,15

SILPA tahun 2023 terrealisasi senilai Rp121.211.058.206,94 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan tahun 2022 terrealisasi senilai Rp83.034.698.805,15. SILPA TA 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 diperoleh dari pembialyan neto senilai (Rp42.776.281.730,55) ditambah surplus senilai Rp163.987.339.937,49 (total Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 senilai Rp4.624.897.387.195,26 dikurangi dengan total Realisasi Belanja Daerah TA 2023 senilai Rp4.460.910.047.257,77). Saldo SILPA per 31 Desember 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 terdiri dari:



3. Sisa Lebih Pembialyan Anggaran SILPA/SIKPA

Sisa Lebih	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembialyan Anggaran	Rp121.211.058.206,94	Rp83.034.698.805,15

Sisa Lebih Pembialyan Anggaran SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih (kurang) antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembialyan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dan Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembukuan Tahun	Rp161.163.473,00	Rp0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 senilai Rp161.163.473,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Nilai tersebut merupakan koreksi kurang catat kas pada rekening utipan CMS senilai Rp1.499.200,00, kurang catat Kas Dana BOSP senilai Rp333.608.953,00, koreksi kesalahan belanja BOS yang belum terrealisasi senilai Rp22.605.000,00 dan koreksi pengakuan belanja BOS yang sudah terjadi senilai (Rp)96.550.000,00.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lebih Akhir	Rp121.211.058.206,94	Rp83.034.698.805,15

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembialyan Tahun Berjalan ditambah SILPA tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dan Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 6.40 Rincian Silpa

Uraian	Nilai
Kas di BUD	84.961.278.910,77
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	34.561.044.085,59
Kas di BLUD SPAM	564.294.838,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	66.436.816,00
Kas Dana BOSP	1.053.496.951,00
Kas Lainnya	1.506.505,18
Silpa Tahun 2023	121.211.058.206,94



Tabel 5.38 Rincian Silpa

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di BUD	84.961.278.910,77
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	34.561.044.085,59
Kas di BLUD SPAM	564.294.838,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	66.436.816,00
Kas Dana BOSP	1.053.496.951,00
Kas Lainnya	1.506.505,18
Silpa Tahun 2023	121.211.058.206,94

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp121.211.058.206,94	Rp83.034.698.805,15

Tabel 5.39 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	83.034.698.805,15	52.544.957.626,61
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Berjalan	83.195.052.278,15	52.544.957.626,61
3	Sub Total (1+2)	(161.163.473,00)	-
4	Sisa Lebih Pembialyan Anggaran (Silpa)	121.211.058.206,94	83.034.698.805,15
5	Sub Total (3+4)	121.211.058.206,94	83.034.698.805,15
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	161.163.473,00	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	121.211.058.206,94	83.034.698.805,15

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp83.034.698.805,15	Rp62.544.957.626,61

Merupakan penjumlahan Saldo yang berasal dari Aksualisasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyusutan lain yang dipерkenalkan. Saldo anggaran Lebih Awal Tahun 2023 senilai Rp83.034.698.805,15 dan Tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61.

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Penggunaan SAL	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp83.195.052.278,15	Rp62.544.957.626,61

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembialyan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembialyan Tahun berjalan. Tahun 2023, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembialyan Tahun Berjalan senilai Rp83.195.052.278,15 dan Tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61.



C. NERACA DAERAH

Neraca Daerah Pemerintah Provinsi NTT adalah Laporan yang menggambarkan posisi kekayaan Pemerintah Provinsi NTT mengenai Aset Daerah, Kewajiban Daerah dan Ekuitas Dана pada periode atau tanggal tertentu. Secara berturut-turut, unsur-unsur dalam Neraca Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. ASET

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp11.259.418.487.077,72	Rp11.663.434.647.950,70

Total nilai Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp11.259.418.487.077,72 atau mengalami penurunan senilai Rp404.016.160.872,98 dari tahun 2022 senilai Rp11.663.434.647.950,70 terdiri atas:

Tabel 5.41 Rincian Aset per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Aset Lancar	499.307.602.592,17	479.497.721.039,95	19.860.881.592,73	4,13
2	Investasi	824.154.472.607,73	865.331.611.166,46	(41.178.888.578,73)	(4,76)
3	Jangka Panjang	9.308.575.197.201,92	9.843.614.899.262,26	(535.039.702.000,34)	5,44
4	Aset Tetap	9.308.575.197.201,92	9.843.614.899.262,26	(535.039.702.000,34)	5,44
5	Jangka Panjang	22.858.448.824,49	22.900.000,00	51.552.448.824,49	470
6	Dana Cadangan	211.429.551.788,31	101.018.740.000,69	110.410.801.786,62	109,30
7	Kas Lainnya	393.518.493.867,95	373.972.116.462,34	19.545.377.495,63	5,09
Jumlah	11.259.418.487.077,72	11.663.434.647.950,70	(404.016.160.872,98)	(3,46)	

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp499.307.602.592,17	Rp479.497.721.039,95

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) buah sejak tanggal pelaporan. Total nilai Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp499.307.602.592,17 atau mengalami kenaikan senilai Rp19.860.881.592,73, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kas di Daerah	84.961.278.910,77	82.145.215.485,65	2.815.063.425,12	3,46
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	89.438.918,00	-	89.438.918,00	-
3	Kas di BLUD	35.125.338.923,69	29.752.472.406,60	5.372.866.514,39	18,00</



No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan
10	Penyihir Putang Pendaoan	(9.175.225.766,41)	(6.464.772.211,03)	(2.710.454.555,38)
11	Penyihir Putang Lainnya	(228.896.710,83)	(233.651.502,55)	4.754.791,72
12	Beban Dibayar di muka	7.289.642.523,50	194.368.745,62	7.095.243.777,98
13	Persediaan Barang Pakai Habis	350.809.548.677,09	282.735.931.771,53	87.873.616.905,56
Total		499.307.602.592,17	479.497.721.039,95	19.869.881.552,22

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp84.961.278.910,77	Rp52.146.215.485,65

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah senilai Rp84.961.278.910,77 atau mengalami kenaikan senilai Rp32.815.063.425,12 dari tahun 2022 senilai Rp52.146.215.485,65, serta merupakan Kas yang berada pada rekening Giro Bank NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Rekening Giro			
a	Bank NTT	-	-
Nr. Rek. 001.01.02.03.04.05.06.07	36.571.262.881,70	51.418.973.610,71	
Nr. Rek. 007.01.02.03.04.05.06.08	48.077.010.010,09	720.781.874,94	
Nr. Rek. 1723.10.0001.07.01.02.03.04.05.06.07.08	1.304.110.994,00	-	
Jumlah	87.053.198.904,77	52.146.215.485,65	
JUMLAH REKENING GIRO (1)	87.053.198.904,77	52.146.215.485,65	
2. Rekening Deposito			
a	Bank NTT	-	-
Jumlah Deposito Bank NTT	-	-	
JUMLAH DEPOSITO (2)	-	-	
Saldo Kas Bank 31 Desember (1+2)	87.053.198.904,77	52.146.215.485,65	
3. Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank			
a	SP2D dalam perjalanan (041.00.02.03.04.05.06.07)	1.804.110.994,00	-
b	Sewah Pengeluaran (Pengeluaran Instansi dan BOS)	-	-
Jumlah Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank	1.804.110.994,00	-	
4. Overbooking yang tidak diakui sebagai penambahan kas			
Kapitalisasi ciptocokok Kas Dinas BOS&P dilengkapi sejelas ke RKUD	287.810.000,00	-	
Overbooking yang tidak diakui sebagai penambahan kas	287.810.000,00	-	
JUMLAH (3 + 4)	2.091.920.994,00	-	
Total Saldo Kas 31 Desember	84.961.278.910,77	52.146.215.485,65	



Tabel 5.45 Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2023

SKPD	Sisa Kas 2023 (Rp)	Tanggal Setor ke Kasda (RKUD) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.816.918,00	5 Januari 2024
Dinas Perkebunan Umum dan Perumahan Rakyat	23.760.000,00	26 Januari 2024
Dinas Sosial	20.000.000,00	23 Januari 2024
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.080.000,00	19 Januari 2024
Jumlah	69.436.918,00	

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.2

4) Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp35.125.338.923,99	Rp29.752.472.409,60

Saldo Kas di BLUD pada tahun 2023 adalah senilai Rp35.125.338.923,99 di mana mengalami kenaikan senilai Rp5.372.866.514,39 dari tahun sebelumnya senilai Rp29.752.472.409,60. Kas di BLUD merupakan kas yang berada di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes dan Kas di BLUD SPAM.

a) Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes

Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
RSUD Prof.	Rp34.561.044.085,59	Rp29.306.479.641,97

Dr. W.Z.

Johannes

Saldo Kas senilai Rp34.561.044.085,59 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2023, yang merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja yang pengelolaannya langsung oleh BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Jumlah senilai Rp34.561.044.085,59 diperoleh dari sisa Kas Tahun 2022 senilai Rp29.306.479.641,97 ditambah Pendapatan selama tahun 2023 senilai Rp13.631.334.006,62 dikurangi jumlah belanja selama tahun 2023 senilai Rp12.376.769.563,00. Saldo Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp3.675.220.183,82 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp5.885.823.901,77 serta Deposito-Setara Kas senilai Rp25.000.000.000,00. Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.1

b) Kas di BLUD SPAM

Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
SPAM	Rp564.294.838,40	Rp445.992.767,63

Saldo Kas senilai Rp564.294.838,40 merupakan saldo Kas di BLUD SPAM Kupang per 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan selama tahun 2023 senilai



Kas senilai Rp1.804.110.994,00 pada Rekening Titipan CMS RKUD merupakan SP2D Netto Outstanding yang masih dalam proses pencairan ke penerima sampai dengan per 31 Desember 2023. Kas tersebut telah terdebit dari Rekening Titipan CMS RKUD pada tanggal 02 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian SP2D Outstanding

SKPD	NOMOR SP2D	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Nilai PFK (Rp)	Nilai SP2D Netto (Rp)
Dinas Kesehatian, Kependidikan dan Pendidikan Tinggi	4747/1.02.00.00/SP2D/L/6/2023	119.091.625,00	15.197.593,00	103.894.032,00
Dinas Kesehatian, Kependidikan dan Pendidikan Tinggi	4748/1.02.00.00/SP2D/L/5/2023	406.140.474,00	47.787.242,00	358.373.232,00
Dinas Kesehatian, Kependidikan dan Pendidikan Tinggi	4752/1.02.00.00/SP2D/L/5/2023	285.000.000,00	33.220.720,00	261.779.280,00
Dinas Kesehatian, Kependidikan dan Pendidikan Tinggi	4754/1.02.00.00/SP2D/L/5/2023	290.495.000,00	32.712.375,00	257.782.725,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4754/1.01.01.00.00/SP2D/L/5/2023	229.001.339,00	105.709.814,00	822.291.725,00
Jumlah		2.039.718.438,00	235.607.444,00	1.804.110.994,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.1

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2023 dan 2022 senilai Rp0,00. Setiap penerimaan langsung disertakan ke RKUD atau Kas di Daerah.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pengeluaran	Rp69.436.916,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan selisih antara SP2D Netto dengan realisasi SPJ yang tidak digunakan dan belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Terhadap Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, telah disertekan Kas Daerah pada Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Rp1.130.451.407,77 dengan Belanja senilai Rp1.012.149.337,00 ditambah Sisa Kas di BLUD SPAM tahun 2022 senilai Rp445.992.767,63.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.2

5) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BOS	Rp1.053.496.951,00	Rp1.136.010.909,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS Tahun 2023 senilai Rp1.053.496.951,00 atau mengalami penurunan senilai Rp82.513.958,90 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.136.010.909,00, yang merupakan sisa Dana BOS yang berada pada Bendahara BOSP SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan direturnakan kembali pada RKAS dan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya digunakan. Saldo kas pada Bendahara BOS terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa SMA	162.674.606,00	684.630.632,90
Sisa SMK	696.936.845,00	450.998.777,00
Sisa SLB	183.885.500,00	82.100,00
Jumlah	1.053.496.951,00	1.136.010.909,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.4 dan N.4.1

Kas pada Rekening Bendahara BOS per 31 Desember 2023 yang tidak diauksi sebagai Sisa Kas Bendahara BOS merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Penerimaan Daerah yang terlambat atau belum di *auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2023 sehingga dilakukan penarikan secara manual oleh bendahara dan disertor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2024 dan lain-lain yang merupakan uang pada saat pembukaan Rekening Sekolah. Sementara saldo pajak yang belum disertor sekolah per 31 Desember 2023 juga tidak diauksi sebagai sisa Kas di Bendahara BOS karena merupakan kewajiban sekolah yang telah disertor pada Januari 2024.

Terdapat saldo Kas di Bendahara BOS pada SUPM Kupang senilai Rp41.374.000,00, di mana status sekolah tersebut telah ditutup pada Juni 2022. Atas sisa kas tersebut belum dilakukan penyetoran ke Kasda, dan masih tersimpan dalam rekening sekolah terkait per 31 Desember 2023.

Selain itu, terdapat sisa Dana BOS pada 4 (empat) sekolah per 31 Desember 2023 yang tidak berada pada rekening giro sekolah namun pada RKUD dengan nomor rekening 001.01.02.001018-7. Kas tersebut merupakan sisa Dana BOS yang belum digunakan oleh sekolah namun telah dipindahbukukan oleh Bank NTT ke Rekening Giro Kas Daerah sesuai Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor:



067/2506/BKUD3.3/2023 perihal Jasa Giro dan penutupan rekening untuk menutup semua rekening pengeluaran dan penerimaan SKPD dan Dana BOS pada tanggal 31 Desember 2023, antara lain:

Tabel 5.47 Rincian Sisa SILPA Dana BOS

No.	Kabupaten	Nama Sekolah	Jumlah (Rp.)
1	Alor	SMKN Muriabang	182.810.000,00
2	Malaka	SMAN Hornekaan	36.000.000,00
3	Manggarai Timur	SMKN 1 Elar	46.000.000,00
4	Ende	SMKN 3 Ende	45.000.000,00
		Jumlah	287.810.000,00

6) Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp202.965.062,18	Rp0,00

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp202.965.062,18 dan pada Tahun 2022 senilai Rp0,00, merupakan Kas Lainnya selain kas siswa belanja pada rekening bendahara pengeluaran. Kas Lainnya terdiri dari:

- Kas pada Rekening Piutang CMS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.499.520,00;
- Kas Pajak Pusat yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 pada 24 sektor senilai Rp201.458.557,00 yang terdiri atas PPB 21 senilai Rp13.168.900,00, PPB 23 senilai Rp24.149.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00. Atas pajak ini telah disetor seluruhnya di tahun 2024;
- Jasa Giro pada Rekening Bendahara Pengeluaran 4 (empat) SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp6.985,18, antara lain:

Tabel 5.48 Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah

No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	UPT Kesiapsiagaan Hutan Wilayah Kabupaten TTG	81	31 Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 4 Januari 2024
2	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Betani	532,59	31 Desember 2023	Belum disetor
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya	2.760,98	31 Desember 2023	Belum disetor
4	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Flores Timur, Sikka, Lembata	1.920,50	Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 27 Maret 2024
5	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Setiajene	930,85	31 Oktober 2023	Disetor ke Kasda pada



(1) Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp2.214.489.565,00 dikelola oleh 4 (empat) SKPD yakni:

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.350.175.490,00 merupakan sejnis antara saldo awal senilai Rp1.349.825.000,00 ditambah koreksi terhadap Piutang Tahun sebelumnya senilai Rp325.000,00 dan ditambah dengan pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp37.675.490,00 dikurangi penyetoran piutang tahun 2023 senilai Rp57.650.000,00;
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp477.625.000,00 terdiri dari sewa Alsiran dan pemakaian Kekayaan Daerah Saldo senilai Rp477.625.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Penyekatan Kekayaan Daerah senilai Rp476.125.000,00 ditambah pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp8.250.000,00 dikurangi penyetoran sewa Alsiran ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp6.750.000,00;
- Piutang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp363.689.750,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp104.200.000,00 dikurangi penyetoran Tahun 2023 senilai Rp3.850.000,00 dan Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp237.952.075 dikurangi penyetoran ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2023 senilai Rp2.715.000,00; dan
- Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT senilai Rp23.000.000,00 merupakan penyetoran piutang tahun 2023 senilai Rp7.700.000,00 ditambah Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp15.300.000,00.

- Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan senilai Rp9.875.000,00 merupakan Piutang sewa bangunan untuk kantin kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT senilai Rp5.200.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.675.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.7, N.7.1, N.7.1.1, N.7.2, N.7.2.1, N.7.2.1.1, N.7.2.1.2, N.7.2.1.3, N.7.2.1.4, N.7.2.1.5, N.7.2.1.6, N.7.2.2, N.7.2.2.1, dan N.7.2.2.2



No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
1	dinas Kebudayaan			11 Januari 2024	
	SUJPN Negeri Kupang		759,38	2022	Belum disetor
	Jumlah		6.885,18		

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.5 dan N.5.1

7) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.175.473.484,10	Rp1.174.124.266,10

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2023 senilai Rp1.175.473.484,10 mengalami kenaikan senilai Rp1.349.218,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.174.124.266,10, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilunasai oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp53.103.583,50 ditambah koreksi saldo piutang tahun 2022 senilai Rp52.198.414,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp52.757.050,00.
- Piutang Pajak Air Perumahan senilai Rp21.928.536,60 yang diperoleh dari saldo awal Piutang senilai Rp221.020.682,60 ditambah Koreksi saldo awal karena adanya perhitungan kembali senilai Rp82.045,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp2.174.191,00.

Atas saldo Piutang Pajak Daerah terdapat piutang berlantai-lantau dan berurun lebih dari 5 (lima) tahun per 31 Desember 2023 yaitu Piutang Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 dan Pajak Air Perumahan senilai Rp168.752.336,60.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2

8) Piutang Retribusi Daerah

Plutang Retribusi Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.238.620.565,00	Rp2.421.647.000,00

Piutang Retribusi Pada Tahun 2023 senilai Rp2.238.620.565,00 mengalami penurunan senilai Rp183.026.435,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.421.647.000,00, yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp14.256.000,00 merupakan Piutang Retribusi Jasa Pemakaian Incenerator pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp2.224.364.565,00 yang terdiri dari:



9) Plutang Lain-lain PAD yang Sah

Plutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp24.583.581.893,78	Rp134.282.043.655,25

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp24.583.581.893,78 yang mengalami penurunan senilai Rp109.698.461.761,47 dari tahun sebelumnya senilai Rp134.282.043.655,25, di mana Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diperoleh dari Hasil Pemasukan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan Denda dengan rincian sebagai berikut.

10) Plutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Plutang Hasil BMD yang Tidak Dipisahkan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp4.818.943.910,78	Rp123.727.240.542,25

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2023 senilai Rp4.818.943.910,78 yang mengalami penurunan senilai Rp119.908.296.631,47 dari tahun sebelumnya sebesar Rp123.727.240.542,25. Piutang ini diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah. Atas nilai piutang tersebut terdapat informasi sebagai berikut:

- Terdapat Piutang yang berlantai-lantau, di mana piutang tersebut merupakan piutang yang diaku pada tahun 2018 s.d. 2021 dan tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan senilai Rp551.160.593,60;
- Terdapat Piutang yang berlantai-lantau, di mana piutang tersebut merupakan piutang yang diaku pada tahun 2018 s.d. 2021 dan tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan senilai Rp551.160.593,60;
- Terdapat Piutang atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilakukan Penutusan Hubungan Kerja (PHK) senilai Rp715.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



No.	Pihak Mitra Kerja	Nomor Perjanjian Kerja Sama/Tanggal	Nomor Permutusan Hubungan Kerja/Tanggal	Nilai Piutang (Rp)
1	PT Clodiek Asian Spool Base	BU.030/03/BPAD/2020 13 Januari 2020	BU.030/028 a/BPAD/2022 31 Agustus 2022	475.815.000,00
2	PT Kupang Rekrutmen	HK.802.2014 10 September 2014	BU.030/182/BPAD/2021 10 Desember 2021	240.000.000,00

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.1.

b) Piutang Pendapatan BLUD

Bludung	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan	Rp19.763.019.233,00	Rp10.553.072.128,00

Saldo Piutang Pendapatan BLUD pada Tahun 2023 senilai Rp19.763.019.233,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp9.209.947.105,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp10.553.072.128,00. Piutang ini merupakan tagihan atas Pelayanan Kesehatan kepada Pihak ketiga termasuk di dalamnya kepada BPJS dan Klaim Obat pada BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang.

Pengakuan Piutang Pelayanan Kesehatan

Atas Piutang Pendapatan BLUD dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

- (1) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Obat Kronis tahun 2023 senilai Rp972.357.765,00 terdiri atas saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp603.900.804 atas milai tersebut pihak RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan.
- (2) Saldo Piutang Pelayanan Gigi Palsu senilai Rp52.800.000,00 merupakan klaim kepada BPJS atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00. Pada tanggal 27 September 2023, BPJS Cabang Kupang mengirimkan surat kepada seluruh Faskes perihal Penjaminan Pelayanan Prothesa Gigi Pada Fasilitas Kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelayanan prothesa gigi hanya diberikan atas rekomendasi dokter gigi FKTP atau dokter gigi spesialis protodontics pada FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selama ini pada RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes yang melakukan pelayanan prothesa gigi bukanlah dokter spesialis protodontics dan pada tahun 2023 pengajuan klaim atas pelayanan tersebut disetujui dan dibayarkan sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan surat dari RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes



No	Bulan Pelajaran	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
6	Desember	Layak	6.263.064.441,00	27/08/XI-04/0124	24 Januari 2024
Subtotal BAHV 2024			14.238.844.031,00		
Total			14.866.887.131,00		

Selain itu, terdapat hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim Pelayanan JKN pada tahun 2023 yang ditutangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dikategorikan dalam status tidak layak senilai Rp173.555.450,00, status pending senilai Rp2.682.207.175,00 dan dinyatakan sebagai potongan seminali Rp2.758.416.507,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Tidak Layak, Pending dan Dinyatakan Sebagai Potongan

No	Bulan Pelajaran	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
Hasil Verifikasi Tidak Layak				
1	Januari	10.931.300,00	1745/BA/XI-04/0523	5 Januari 2023
2	Februari	15.632.700,00	1854/BA/XI-04/0523	20 Juni 2023
3	Maret	3.916.500,00	2052/BA/XI-04/0723	12 Juli 2023
5	Mei	82.297.825,00	3270/BA/XI-04/0523	25 Oktober 2023
			2702/BA/XI-04/0523	20 Juni 2023
6	Juni	46.151.300,00	545/BA/XI-04/1123	13 November 2023
7	Juli	20.840.700,00	3820/BA/XI-04/1123	8 Desember 2023
B	Agustus	9.981.400,00	62/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
9	September	1.639.525,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
Jumlah Hasil Verifikasi Tidak Layak		173.555.450,00		
Hasil Verifikasi Pending				
1	Agustus	942.947.000,00	305/BA/XI-04/0224	1 Februari 2024
2	September	6.394.400,00	566/BA/XI-04/0424	23 April 2024
3	November	136.109.100,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024
4	Desember	2.007.158.675,00	270/BA/XI-04/0124	24 Januari 2024
Jumlah Hasil Verifikasi Pending		2.682.207.175,00		
Hasil Verifikasi Dinyatakan Sebagai Potongan				
1	2022	1.452.718.000,00	152/BA/XI-04/0123	16 Januari 2023
			1441/BA/XI-04/0523	8 Mei 2023
2	Jan-23	64.403.207,00	566/BA/XI-04/0223	27 Februari 2023
3	Mar-23	372.563.200,00	1256/BA/XI-04/0423	14 April 2023
4	Apr-23	94.296.500,00	1618/BA/XI-04/0523	18 Mei 2023
5	Jun-23	186.698.600,00	2195/BA/XI-04/0723	18 Juli 2023
6	Sep-23	335.797.600,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
7	Okt-23	249.958.300,00	3605/BA/XI-04/1123	22 November 2023
Jumlah Potongan		2.794.416.507,00		

Atas hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim yang diajukan oleh RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes dengan status Pending,



kepada BPJS Kesehatan Kupang perihal Permintaan Pembayaran Tagihan Klaim Gigi Palsu Bulan Agustus dan September tanggal 23 Oktober 2023 dijelaskan bahwa pelayanan dilakukan sebelum surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan diterima, syarat mengenai dokter yang menangani pelayanan prothesa gigi diwajibkan dokter spesialis baru diketahui pihak RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes saat surat tersebut dikeluarkan, belum terdapat sosiialisasi dari pihak BPJS terkait dengan syarat tersebut, sehingga Piutang atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00 masih tetap diajukan.

- (3) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes, kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Jamuan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.433.845.256,00 yang terdiri dari saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp748.257.725,00 ditambah dengan Piutang atas Pendapatan atas Pelayanan JKN 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 RSUD, Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan atas Piutang bawaan dari tahun sebelumnya. Piutang dan Pendapatan mutu tahun 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 merupakan hasil verifikasi BPJS dengan status layak yang ditutangkan dalam BAHV pada tahun 2023 senilai Rp446.743.100,00 dan tahun 2024 senilai Rp14.238.844.031,00. Rincian Piutang mutu tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Piutang Tahun 2023 yang Bersumber dari Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Layak pada Tahun 2023 dan 2024

No	Bulan Pelajaran	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
A. BAHV 2023					
1	Juli	Layak	446.743.100,00	4029/BA/XI-04/123	22 Desember 2023
Subtotal BAHV 2023					
B. BAHV 2024					
1	Juli	Layak	2.740.100,00	92/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
2	Agustus	Layak	2.428.904.562,00	92/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
3	September	Layak	2.786.333.753,00	586/BA/XI-04/0424	23 Februari 2024
4	Oktober	Layak	48.040.000,00	964/BA/XI-04/0424	1 April 2024
5	November	Layak	2.711.761.175,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024



Tidak Layak dan Potongan tidak diajukan sebagai bagian Piutang milik Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya terdapat perbedaan nilai antara piutang pelayanan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan utang yang diajukan oleh Pengguna Jasa Layanan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian Perbedaan Pengakuan Piutang Pemprov NTT dan Utang Pengguna Layanan

No	Nama	Piutang yang diajukan oleh RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Rp)	Nilai Utang yang dicatat Pengguna Layanan (Rp)	Selisih (Rp)
1	RS Siolaun Kupang	27.622.150,00	0,00	27.622.150,00
2	Mandiri InHealth	109.755.329,00	88.108.876,00	21.646.453,00
Jumlah		137.377.479,00	88.108.876,00	49.268.603,00

Atas Piutang tersebut masih dilakukan rekonsiliasi dengan Piutang Pengguna Layanan.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.2.

c) Piutang Denda

Piutang Denda	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.618.750,00	Rp0,00

Saldo Piutang Denda Tahun 2023 senilai Rp1.618.750,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 merupakan denda yang diketahui atas Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang belum dibayarkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Dinas Kehutani dan Perikanan senilai Rp1.618.750,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.3.

d) Piutang atas Fasilitas TDF

Piutang atas Fasilitas TDF	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp1.730.985,00

Saldo Piutang atas Fasilitas TDF Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp1.730.985,00. Deposito senilai Rp1.730.985,00 yang diperoleh dari Treasury Deposit Facilities (TDF) yang diajukan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara nontunai melalui TDF Tahun 2022.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8 dan N.8.4.



10) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.402.342.165,00	Rp2.353.300.510,00

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di mana saldo Tahun 2023 senilai Rp1.402.342.165,00 mengalami penurunan senilai Rp950.958.345,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.353.300.510,00 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dan Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut.

- a) Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp1.179.342.165,00 merupakan bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda empat tahun 2023 yang diperoleh dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat tahun 2022 senilai Rp2.130.300.510,00 ditambah bagian lancar kredit kendaraan tahun 2023 senilai Rp1.179.342.165,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp2.130.300.510,00.
 - b) Tanda Tahun 2023, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp23.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum difinansiasi.
- Rincian lebih lanjut, lihat Lampiran N.9, N.9.1, N.9.1.1, N.9.1.1.1, N.9.1.1.2, N.9.1.2, dan N.9.1.2.1

11) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp9.410.123.480,24)	(Rp6.698.123.713,60)

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai (Rp9.404.123.480,24) merupakan penyisihan atas nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 dan saldo Penyisihan Piutang pada 31 Desember 2022 senilai (Rp6.698.423.713,60) atau mengalami kenaikan senilai Rp2.705.699.766,64. Penyisihan Piutang ini merupakan nilai piutang yang disisihkan berdasarkan kategori pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

- a) Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp9.175.226.769,41) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.53 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.150.385.384,10)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.085.342.743,85)



- a) Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp263.037.503.690,09 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.56 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	10.833.343,00
2	Inspektorat Daerah	1.550.100,00
3	Badan Penghubung	19.136.710,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	2.644.000,00
5	Dinas Peternakan	2.667.888,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	469.600,00
7	Alat Kaberitaan	133.762.780,00
8	Badan Pengitungan	47.400,00
9	Dinas Perikanan	1.000.000,00
10	Persediaan Lainnya	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
11	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	43.487.722,80
12	Bahan Laboratorium	769.294.563,76
13	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Rumah Sakit)	3.726.098.727,30
14	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid-19)	0,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.057.237,50
16	Persediaan Barang Habis Pakai	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
17	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid-19)	167.188.320,53
18	Persediaan Bahan Linen	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
19	Persediaan Bahan Perluaran Laboratorium	45.161.660,00
20	Dinas Kesehatan	500.481.629,45
21	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	Dinas Peternakan
22	Jumlah	8.051.450,00
23	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	Dinas Peternakan
24	Persediaan Bibit Tembakau	20.470.400,00
25	Dinas Peternakan	007.800.000,00
26	Persediaan Bibit Tanaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27	Dinas Kesehatan	159.842.000,00
28	Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan (OVABEKES)
29	Jumlah	784.957.744,13
30	Dinas Kesehatan (RSJ)	236.205.870,50



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.939.498.641,46)
Jumlah		(9.175.226.769,41)

- a) Penyisihan Piutang Lainnya (Rp228.896.710,83) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.54 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(5.896.710,83)
2	Penyisihan Bagian Lancar Dara Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)

12) Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Dikurangi	Rp7.289.642.523,50	Rp194.398.745,52

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.289.642.523,50 mengalami kenaikan senilai Rp7.095.243.777,98 dari tahun sebelumnya senilai Rp194.398.745,52. Beban Sewa Dibayar Dimuka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

Tabel 5.55 Catatan Beban Dibayar Di muka per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kesehatan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas (Cabang Dinas di Kabupaten)	126.791.666,67
		Sewa Rumah Dinas	46.750.000,00
b)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas (UPRT di Kabupaten)	2.919.666,67
c)	Dinas Pendidikan	Progres Pisker Pengajar	7.113.184.190,16
		Jumlah	7.289.642.523,50

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran N.10, N.10.1, dan N.10.2

13) Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Persediaan	Rp350.609.548.677,09	Rp262.735.931.771,53

Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah senilai Rp350.609.548.677,09 mengalami kenaikan senilai Rp87.873.616.905,56 dari tahun sebelumnya senilai Rp262.735.931.771,53 di mana perhitungan persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan stock opname barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp350.609.548.677,09 terdiri dari:



No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
15	Persediaan Bahan Obat-obatan	7.848.931,37
16	Dinas Kesehatan	156.952.543.535,14
17	Dinas Peternakan	115.864.083,00
18	Sekretariat Daerah	14.159.300,00
19	Persediaan Farmasi	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
20	Persediaan Radiologi	14.138.176.483,97
21	Dinas Kesehatan	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Rumah Sakit)
22	Persediaan Bahan Makanan	73.995.464,00
23	Persediaan Bahan Makanan Tembakau/Pakan Tembakau	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
24	Dinas Peternakan	750.735.680,00
25	Bahan Reagensia	Dinas Kesehatan
26	Jumlah	637.508.705,84
27	Alat Kantor Lainnya	Dinas Peternakan
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7.317.000,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan
30	Dinas Sosial	70.880.000,00
31	Persediaan Barang yang diberikan ke Pihak Ketiga	164.728.055,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	81.587.317.079,00
	Jumlah	263.037.503.690,09

- a) Persediaan Barang Lainnya senilai Rp87.572.044.987,00 merupakan Persediaan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diberikan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp172.800.000,00 dan Persediaan per Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp87.399.244.987,00

Atas saldo Persediaan tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Terdapat persediaan dari TA 2021 yang belum dicatatkan kepada masyarakat tetapi sudah digunakan oleh masyarakat dengan detail sebagai berikut.

- a) Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Lintas Batas Kota Kupang-Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) merupakan persediaan berupa ruas jalan yang akan diperlukan kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Pengadaan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada bulan September 2021 jalan telah digunakan langsung oleh masyarakat;



- (2) Pekerjaan Perbaikan Saluran Irigasi Air Sagu di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang merupakan pengadaan perbaikan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada Desember 2021 saluran tersebut telah digunakan langsung oleh masyarakat; dan
- (3) Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Reba (Destinasii Wisata) Kabupaten Manggarai merupakan Pengadaan proyek dilakukan pada tahun 2021 dan selesai pada 22 November 2021 dengan *Final Hand Over* (FHO) pada tanggal 2 Juni 2022.
- (b) Pengelolaan Persediaan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD-D) belum dilakukan secara komprehensif oleh BPAD. BPAD hanya mencatat persediaan SKPD-D yang masih berada pada Pengiriman Dari BPAD ditambah dengan persediaan SKPD-D pada empat UPTD Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur, tanpa mencatat sisanya persediaan SKPD-D yang berada pada 18 UPTD Pendapatan Daerah lainnya.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.11

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Panjang	Rp824.154.472.607,73	Rp865.331.161.186,46

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2023 senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp1.176.688.578,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp865.331.161.186,46 yang terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Panjang Non Permanen	Rp0,00	Rp1.367.363.828,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp1.367.363.828,00 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat yang telah selesai.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.12



Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2023 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp525.007.000.000,00 dan tidak ada penambahan setoran modal pada tahun 2023. Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp525.007.000.000 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp661.443.002.352,23 ditambah perhitungan bagian Dividen terhadap laba tahun 2023 senilai Rp26.676.504.417,12 (25,51% x Rp104.572.733.897,00).

Atas Laporan Keuangan PT Bank NTT Tahun telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadimata, Hidayat, Arsono, Refno, Palitang dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 26 Maret 2024.

- b) Penyerahan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp617.181.934,27. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,90% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,10% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.59 Perhitungan Investasi PT Flobamor

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp3.267.270.457,11
2 Ditambah:	
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp450.083.395,12
3 Dikurangi:	
- Rugi Tahun 2023 99,90% x Rp2.595.743.480,00 (unaudited)	Rp2.595.145.736,52
- Koreksi Perhitungan	Rp505.026.181,44
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp617.181.934,27

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2023 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah karena terus mengalami kerugian sehingga menyebabkan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT terkoreksi pada tahun 2022 senilai Rp3.267.270.457,11 (*equity method*) ditambah penyesuaian nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dikurangi Rugi Tahun 2023 senilai Rp2.595.145.736,52 dan koreksi perhitungan terhadap laba tahun 2022 yang tidak diskor ke Kas Daerah senilai Rp505.026.181,44 sehingga saldo awal Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi senilai Rp617.181.934,27.

Tahun 2023 PT Flobamor tidak menyetor deviden laba tahun 2022 senilai Rp505.026.181,44 (Bagian Laba Tahun 2021:



2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jangka Panjang Permanen	Rp824.154.472.607,73	Rp863.963.797.358,46

Pada Tahun 2023 saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp39.809.324.750,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp863.963.797.358,46. Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyerahan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel 5.57 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Metoda
1	Bank NTT	650.037.927.919,04	989.504.325.854,15	Ekuitas
2	PT Jawicoda	166.144.292.474,42	152.054.933.206,20	Ekuitas
3	PT Flobamor	617.181.934,27	3.267.270.457,11	Ekuitas
4	PT Ki Bozik	16.754.320.282,00	17.537.287.841,00	Ekuitas
5	PT ASKRIDA	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	Biaya
6	Jumlah	824.154.472.607,73	863.963.797.358,46	

Adapun rincian perhitungan setiap BMUD adalah sebagai berikut.

- a) Penyerahan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04. Saldo Penyerahan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 25,51%. Perhitungan saldo Investasi pada PT Bank NTT tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.58 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp669.504.326.854,15
2 Ditambah:	
- Bagian Laba Tahun 2023 : 25,51% x Rp104.572.733.897 (audited)	Rp26.676.504.417,12
3 Dikurangi:	
- Penerimaan Dividen	Rp53.979.253.232,00
- Koreksi Perhitungan	Rp50.536.570,55
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp11.573.213.549,66
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp650.037.827.919,04

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

99,00% x Rp510.127.456,00) dan terdapat kenaikan nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dan pengumuman rugi tahun 2023 senilai Rp2.597.743.480,00) yang secara otomatis mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp2.595.145.736,52 (Bagian Rugi Tahun 2023: 99,90% x Rp2.597.743.480,00) sehingga nilai investasi Pemprov NTT sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp617.181.934,27.

- c) Penyerahan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida adalah senilai Rp156.144.242.474,42. Penyerahan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,80% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,20% milik GKPRJ Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.60 Perhitungan Investasi PT Jamkrida

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp152.054.933.206,20
2 Ditambah:	
- Bagian Laba Tahun 2023 : 99,80% X 13.617.432.361,00 (Audited)	Rp13.617.432.361,00
- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp30.260.596,31
3 Dikurangi:	
- Penerimaan Dividen	Rp1.384.390.406,00
- Koreksi Perhitungan	Rp6.378.12.119,37
4 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp156.144.242.474,42

Total Penyerahan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp129.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyerahan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Laba bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyesuaian untuk dana cadangan.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT pada PT Jamkrida senilai Rp156.144.242.474,42 diperoleh dari Total Penyerahan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp129.000.000.000,00 dikurangi Koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp50.588.228,00 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2023 senilai Rp13.590.197.496,28 (99,80% x Rp13.617.432.361,00).



- d) Penyertaan Modal pada PT KI Bolok semai Rp15.755.220.280,00. Penyertaan Modal pada PT KI Bolok menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 100% milik Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut,

Tabel 5.61 Perhitungan Investasi PT KI Bolok

1 Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp15.757.287.841,00
2 Dikurangi:	
- Rugi Tahun 2023 100,00% X - (Rp. 782.047.561,00) (Unaccrued)	Rp1.782.047.561,00
3 Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp15.755.220.280,00

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT tidak menambah Penyertaan Modal sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2022 sama dengan total penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 yakni Rp22.000.000.000,00. Sesuai laporan keuangan (*Unaudited*) PT KI Bolok terus mengalami kerugian setiap tahun dan di tahun 2023 senilai (Rp1.782.047.561,00). Dengan menggunakan metode ekuitas maka saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tetapnya senilai Rp15.755.220.280,00 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp22.000.000.000,00 ditambah koreksi nilai Ekuitas pada tahun buku 2021 senilai Rp80.630.005,54 dikurangi akumulasi perhitungan kerugian laba 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun buku 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang secara total diakumulasi menjadi senilai (Rp6.325.459.723,54) (Rp1.770.832.029,54 + Rp1.250.300.544,00 + Rp1.522.279.589,00 + Rp1.782.047.561,00).

- e) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Askrida senilai Rp1.600.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT Askrida sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.600.000.000,00 atau tidak ada penambahan modal disector pada tahun 2023.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.13

c. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp9.308.575.197.201,92	Rp9.843.614.899.262,26

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp9.308.575.197.201,92 mengalami penurunan senilai

Tabel 5.64 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.344.464.584,52			318.344.464.584,52
2	Johnson Prat. Dr. W.Z.	38.081.709.000,00			38.081.709.000,00
3	Dinas Kesehatan	69.349.209.000,00	8.167.478,156,00		78.416.678.156,00
4	Dinas Pelepasan Umar dan Pengembangan Raya	305.918.640.285,70			305.918.640.285,70
5	Dinas Sosial	21.307.665.000,00			21.307.665.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga		2.128.250.000,00		2.128.250.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.757.954.595,00			55.757.954.595,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.429.443,164,00			1.429.443,164,00
9	Dinas Perindustrian dan Masyarakat	40.817.983.501,00			40.817.983.501,00
10	Dinas Kominfo dan Informatika	4.652.500.000,00			4.652.500.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.449.300.000,00			16.449.300.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha	227.676.000.000,00			227.676.000.000,00
13	Dinas Koopkop dan Pengembangan Desa	4.884.511.000,00			4.884.511.000,00
14	Dinas Perikanan dan Kelautan	88.652.207.019,31			88.652.207.019,31
15	Dinas Pemasaran dan Ekspor Kreasi	13.472.490.400,00			13.472.490.400,00
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	47.720.582.360,00			47.720.582.360,00
17	Dinas Pendidikan	29.574.128.018,52		128.000,000,00	29.574.128.018,52
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.439.685,00		1.500.000.000,00	1.439.385,00
19	Dinas Peningkatan dan Pengembangan	29.077.810.000,00			29.077.810.000,00
20	Subsekratariat Umaran	219.976.000.000,00			219.976.000.000,00
21	Bekeratrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.333.000.000,00			40.333.000.000,00
22	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.925.000.000,00		1.929.000.000,00	0,00
23	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.253.373.064.138,00	78.113.800.000,00	41.428.589.461,54	1.286.058.275.576,46
24	Badan Pengelolaan Sumber Daya Maritim	1.790.000.000,00			1.790.000.000,00
25	Badan Pengelolaan Properti NTT	7.298.400.000,00			7.298.400.000,00
26	Inspektorat Daerah	1.050.000.000,00			1.050.000.000,00
27	Badan Kesiapsiagaan Bencana dan Pamtas	13.897.314.000,00			13.897.314.000,00
	Jumlah	2.946.039.625.118,05	89.407.528.156,00	99.902.838.461,54	2.935.540.314.812,51

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.946.035.625.118,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp89.407.528,156,00 dan pengurangan senilai Rp99.902.838.461,54 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai



Rp535.039.702.060,34 dari tahun sebelumnya senilai Rp9.843.614.899.262,26 yang disajikan berdasarkan nilai buku dari aset tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/\nPenurunan (Rp)
1	Tanah	2.935.540.314.812,51	2.946.035.625.118,05	83.412,54
2	Peralatan dan mesin	1.983.477.478.690,68	1.735.225.417.399,36	248.252.061.494,32
3	Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017,84	2.297.838.521.596,67	163.433.068.421,17
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	6.619.220.982.207,81	6.509.714.953.635,49	109.506.328.572,32
5	Aset tetap lainnya	245.861.097.870,39	222.868.117.017,35	23.062.960.853,04
6	Konstruksi Dalam Pengembangan (KDP)	185.869.865.804,05	221.575.002.029,50	(36.879.136.225,45)
7	Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401,36)	(4.089.662.437.451,20)	(1.233.119.994.871,16)
	Jumlah	9.308.575.197.201,92	9.843.614.899.262,26	(559.039.702.060,34)

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp535.039.702.060,34 atau -5,44%. Rincian masing-masing aset tetap sebagai berikut.

1) Tanah

Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.935.540.314.812,51	Rp2.946.035.625.118,05

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp2.935.540.314.812,51 merupakan nilai seluruh aset tanah yang dimiliki dan dikusulkan oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022	2.946.035.625.118,05
2	Penambahan:	42.358.278.156,00
	Penilaian Kembali Nilai Jualah dari Kemkes	9.167.478.156,00
	Penilaian Kembali Nilai Tanah di BPAD	33.190.800.000,00
3	Pengurangan:	52.853.588.461,54
	Hibah ke KONI	4.000.000.000,00
	Konksi Karera Double Cetak Tanah di Dinas ESDM	1.500.000.000,00
	Konksi Karera Loubie Lasaar Tanah di Bapelitbangda	1.925.000.000,00
	Reklas ke KSPD dan BGS	125.000.000,00
	Konksi Nilai Pemanfaatan Aset	33.140.738.461,54
	Reklas ke Properti Investasi	12.162.850.000,00
4	Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 (1+2-3)	2.936.640.314.812,51

Rp2.935.540.314.812,51. Terdapat perbedaan senilai Rp47.049.250.000,00 antara mutasi aset tetap tanah secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset tetap tanah di SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di mana tanah yang digunakan oleh Pemerintah selaku Pengelola Barang untuk menghasilkan pendapatan melalui KSP dan BGS, sehingga dipindahkan dari SKPD selaku pengguna Barang ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengelola barang.

Atas aset Tetap Tanah terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dicatat dalam KIB A dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Daftar Tanah pada Sekolah yang Belum Di catat pada KIB A

No.	Nama Sekolah	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan Tanah	Tahun Bukti Kepemilikan Tanah
1	SMA N 2 Lombok Selatan	8.699	Sertifikat Hak Pakai No 00612	2023
2	SMKN Mataram	16.000	BAST Hibah Tanah	2020
3	SMK Negeri Molia Tengah	18.000	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun
4	SMK Negeri 1 Boleng	20.880	BAST Hibah Tanah	2020
5	SMK Negeri Komodo	9.600	BAST Hibah Tanah	2009
6	SMKN 1 Waingapu	7.028	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun

- b) Terdapat sertifikat Tanah milik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diserahkan atau tidak dikusulkan oleh Bidang Aset BPAD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Daftar Sekolah dengan Sertifikat Tanah yang Belum Diserahkan atau Belum Dikusulkan oleh Bidang Aset BPAD

No.	Nama Sekolah	Bukti	Name Pemohon	Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
1	SMAN 2 Lombok Selatan	Sertifikat	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	Tidak diketahui	
2	SMKN Mataram	Sertifikat	Pemerintah Kab. Ator	Tidak diketahui	
3	SMAN 2 Kupang	Sertifikat	Pemerintah Kota Kupang	Tidak diketahui	
4	SLBN Kanatalang	Sertifikat	Kop Pegawai Republik Indonesia Tingkat II Sumba Timur	Tidak diketahui	
5	SMKN 1 Waingapu	Sertifikat	Pemerintah Kab. Sumba Timur	Tidak diketahui	
6	SMAN 2 Jerebu	Sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui	
7	SMAN 2 Bejawa	Sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui	



No.	Nama Sekolah	Jenis Buktii	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
8	SMAN 1 Mauponggo	Sertifikat	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak diketahui
9	SMAN 8 Kupang	Sertifikat asli	Pemerintah Kota Kupang	SMAN 8 Kupang
10	SMAN 1 Komodo	Sertifikat asli	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	SMAN 1 Komodo
11	SMAN 2 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	SMAN 2 Borong
12	SMKN 1 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	SMKN 1 Borong

- c) Terdapat sertifikat tanah pada SMAN 1 Lewa yang masih mengetahuan namakan pemilik lama atau belum berpindah ke Pemerintah Provinsi NTT seluas 20.000 m².

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.983.477.478.890,68 Rp1.735.225.417.396,36

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp1.983.477.478.890,68 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, perlantai lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Urutan	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	1.735.225.417.396,36
2	Penambahan:	265.244.198.417,40
	Belanja Modal TA 2023	193.621.780.165,50
	Uang	77.129.800,00
	Penambahan Utang BLUD RSUD	242.700.000,00
	Koreksi Nilai P2D	659.921.381,00
	Pindah ke Rusak Bantuan Dinas Koperasi	60.000.000,00
	Reklais Antar KIB	18.721.939.405,90
	Hibah	51.768.151.965,00
	Koreksi Kurang Catat di Sekretariat Daerah	7.000.000,00
	Reklais dan Berjas	10.710.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Pendidikan	164.870.000,00
3	Pengurangan:	16.992.134.923,06
	Hibah	83.860.000,00
	Reklais Antar KIB	8.243.476.500,00
	Reklais ke Barjas	588.043.235,00
	Koreksi Lebih Catat di BPDSM	90.000.000,00
	Koreksi Lebih Catat di BKD	173.800.000,00
	Koreksi Lebih Catat di Dinas Pendidikan	22.425.000,00
	Kapitalisasi	173.945.050,00
	Penghapusan Aset	2.014.530.902,00
	ATB	142.340.000,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
22	Dinas Pendidikan dan Pertanaman	4.490.278.809,95	489.000.000,00	168.790.000,00	4.824.528.509,85
23	Badan Pengembangan Daerah	96.509.266.962,92	2.595.797.036,90	4.757.818.347,00	54.967.245.024,42
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.014.343.036,00	82.023.756,00	3.231.340.000,00	54.872.805.788,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.877.979.273,00	-	-	4.877.979.273,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Negara	50.437.035.181,43	1.281.489.998,00	4.028.477.418,00	54.194.104.581,43
27	Badan Keuangan Daerah	8.317.291.896,00	115.361.190,00	-	8.430.643.089,00
28	Badan Kependidikan Daerah	7.008.704.608,00	324.859.020,00	-	7.333.583.628,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.086.966.287,05	125.431.500,00	1.483.006.315,00	7.768.380.502,00
30	Badan Pengelola Perkebunan	1.715.470.900,00	25.574.000,00	131.028.490,00	1.850.416.490,00
31	Badan Perwakilan Provinsi NTT di Jakarta	5.414.710.209,00	202.100.000,00	-	5.616.810.209,00
32	Badan Perdagangan Daerah	115.025.913,00	15.297.000,00	205.027.790,00	4.921.450.117,00
33	Badan Keuangan Daerah dan Posko	1.450.230.217,00	29.025.000,00	-	1.482.356.217,00
	Jumlah	1.732.223.417.396,38	216.655.883.915,40	28.403.822.419,08	1.932.477.478.890,68

Berdasarkan saldo awal seminali Rp1.735.225.417.396,36 maka terjadi kenaikan seminali Rp28.403.822.419,08 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 seminali Rp1.983.477.478.890,68. Terhadap perbedaan seminali Rp11.411.887.496,00 antara mutasi aset tetap Peralatan dan mesin secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Peralatan dan mesin di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

Tabel 5.59 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklais antar SKPD

No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.049.999,00	-	Mutasi dari BPAD
2	Dinas Perhubungan	209.880.000,00	-	Mutasi dari BPAD
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.049.999,00	-	Mutasi dari BPAD
4	Dinas Pertanian dan Kelanternan Pangan	483.000.000,00	220.049.999,00	Mutasi dari Keluar ke SKPD



No.	Urutan	Nilai (Rp)
1	Utang	470.986.349,05
	Rusak Berat	4.238.347.887,08
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	1.983.477.478.890,68

Tabel 5.58 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Perikanan dan Kehutanan	844.311.038.595,13	144.873.343.135,00	53.425.000,00	988.230.998.731,03
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	247.853.258.938,60	54.325.757.105,00	8.714.596.989,00	295.880.408.052,00
3	Dinas Kesehatan	144.106.281.818,00	183.329.273,00	204.871.180,00	160.553.324.811,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	42.950.725.815,00	208.286.064,00	220.630.000,00	43.022.414.409,00
5	Badan Peradilan	4.040.932.604,00	-	-	4.040.932.604,00
6	Badan Pengembangan Perekonomian dan Keterpaduan Sosial	19.758.537.548,00	37.000.000,00	-	19.795.633.548,00
7	Dinas Sosial	13.217.048.438,02	281.785.355,00	357.278.061,00	13.241.515.735,02
8	Dinas Pendidikan	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	-	1.040.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.763.550.759,00	151.871.159,00	-	1.915.252.758,00
10	Dinas Perdagangan	62.313.977.338,84	10.451.158,00	2.960.000,00	65.764.155.609,94
11	Dinas Perikanan dan Kehutanan	2.642.840.004,00	-	-	2.642.840.004,00
12	Dinas Pendidikan	52.163.816.259,40	10.877.199.209,00	92.941.017.493,40	52.163.816.259,40
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.571.975.288,93	330.572.989,00	-	8.002.548.287,93
14	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transaksi Internasional	5.334.213.453,00	-	-	5.334.213.453,00
15	Dinas Perikanan dan Kehutanan	4.577.768.858,00	-	-	4.577.768.858,00
16	Dinas Kesehatan dan Perkembangan Perdesaan dan Perkotaan	5.436.231.514,00	121.924.000,00	295.000.000,00	5.262.935.516,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28.958.137.228,00	3.954.639.160,00	74.118.180,00	32.576.658.739,00
18	Dinas Perikanan dan Kehutanan	3.758.796.024,96	-	223.036.000,00	3.545.761.024,96
19	Dinas Perikanan dan Kehutanan	50.617.499.847,00	6.416.255.744,00	394.049.989,00	51.639.795.992,00
20	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transaksi Internasional	9.961.472.929,05	1.889.425.000,00	872.330.000,00	10.374.587.929,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.471.424.248,00	-	-	4.471.424.248,00



No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
5	Sekretariat Daerah	2.154.012.500,00	1.575.154.898,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke BPAD
6	Badan Pengembangan Aset Daerah	7.249.209.998,00	4.162.477.498,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke SKPD
7	Badan Kependidikan Daerah	228.685.000,00	-	Mutasi dari BPAD
8	Badan Penghubungan Provinsi NTT di Jakarta	649.800.000,00	-	Mutasi dari BPAD
9	Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	222.685.000,00 Pinjaman ke BPAD
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	5.231.340.000,00	Pinjaman ke BPAD
	Jumlah	11.411.887.496,00	11.411.887.496,00	

Ales Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat 126 kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKPB) asli pada empat SKPD diukur atau disimpan oleh pemakai kendaraan dengan nilai Rp14.519.043.235,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 BKPB Kendaraan yang Disimpan oleh Pengguna Aset

No.	Nama SKPD	Jumlah BKPB	Nilai (Rp)
1	RSU Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	29	7.927.810.000,00
2	Dinas Perikanan Dan Keterpaduan Sosial	57	1.957.660.000,00
3	Dinas PUPR	24	4.319.038.235,00
4	Dinas Pariwisata	13	314.534.000,00
	Jumlah	123	14.519.043.235,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp2.461.271.590.017,84 Rp2.297.838.521.596,77

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang disajikan seminali Rp2.461.271.590.017,84 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.297.838.521.596,77	
2	Perambahan:	311.286.161.392,14	
	Belanja Model TA 2023	248.250.770.111,00	
	Reklais Antar KIB	9.944.170.171,00	
	Hibah dari Kementerian	6.106.672.000,00	
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00	
3	Pengurangan:	147.853.092.707,97	
	Koreksi lebih Catat	45.524.171.101,00	